



**INSPEKTORAT  
JENDERAL**

# LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT INSPEKTORAT

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**REFORMASI  
HUKUM**

**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**



**tjen PINTAR**  
MENGAJAL KINERJA

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tersusunnya Laporan Akhir Tahun 2023 unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program/kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai perwujudan peran dan layanan pada Tahun 2023 sebagai quality assurance dan advisory services. Laporan Tahun 2023 ini bukan sekedar formalitas kewajiban pemenuhan pertanggung jawaban tetapi merupakan segala upaya dan jerih payah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang wajib direfleksikan dan dievaluasi guna perbaikan dalam tahun mendatang. Terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terealisasi bukan tanpa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pedoman pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun patut disyukuri dengan adanya keterbatasan tersebut akan tampak upaya kerja keras dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan Visi Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2023, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kami menyadari bahwa Inspektorat Jenderal selakupengawas internal di lingkup Kementerian Hukum dan HAM harus terus berbenah diri. Masihbanyak yang memerlukan optimalisasi sehingga pengawasan yang dilaksanakan lebih efektif. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (Quality Assurance) dan memberikan layanan konsultasi (Advisory Services). Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih.



Jakarta, 12 Januari 2024  
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yayah Mariani  
NIP. 196403111994032007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Umum .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Dasar Hukum.....	3
<b>BAB II KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.....</b>	<b>4</b>
A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja .....	4
B. Struktur Organisasi .....	6
C. Sumber Daya.....	9
<b>BAB III HASIL YANG DICAPAI.....</b>	<b>14</b>
A. Capaian Kegiatan .....	14
B. Audit .....	20
C. Reviu .....	34
D. Evaluasi .....	36
E. Pemantauan .....	48
F. Kegiatan Pengawasan Lainnya.....	49
G. Capaian Lainnya.....	51
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Kendala .....	89
C. Saran.....	89

## ABSTRAK

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2023 mengemban Program Dukungan Manajemen yang mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Kemnetraian Hukum dan HAM yang dijabarkan pada 7 (tujuh) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI serta Kegiatan Dukungan Manajmeen Sekterariat Inspektorat Jenderal. Di level Program dilaksanakan melalui arahan dan pembinaan serta korodinasi pimpinan baik internal Inspektorat Jenderal,maupun terhadap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan juga koordinasi eksternal dengan Instansi terkait seperti BPK, BPKP, KEMENPANRB, BKN, KPK danInstansi lainnya. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan intern Tahun 2023 antara lain sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam hal ini kompetensi auditor yang belum merata, keterbatasan sumber daya APIP yang mengerti tentang Teknologi Informasi menjaditantangan Inspektorat Jenderal dalam mengimplementasikan kinerja di era Teknologi 5.0. Keterbatasan lainnya terkait sarana prasarana pengawasan. Laporan Akhir Tahun 2023 ini menggambarkan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Maturitas penyelenggaraan SPIP, dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan capaian lainnya serta rangkuman kegiatan pengawasan (audit, reuiu, evalausi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk kegiatan dukungan manajemen) selama Tahun 2023.

Kata Kunci: IKU, IKK, RB, SPIP, SAKIP, Pengawasan (audit, reuiu, evalausi, pemantauan dankegiatan pengawasan lainnya termasuk kegiatan dukungan manajemen).

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

Dalam pasal 318 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM bahwa kedudukan dan tugas fungsi Inspektorat Jenderal adalah Kedudukan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Tugas Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan intern, dan mempunyai fungsi penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan, pelaksanaan Pengawasan Intern, pengawasan untuk Tujuan Tertentu, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi dan fungsi lain yang diberikan Menteri. Pengawasan internal tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya dalam mengawal peningkatan kualitas laporan keuangan, Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan integritas pegawai. Pengawasan intern dilaksanakan agar harmoni dalam gerak dan langkah melaksanakan kolaborasi untuk mencapai target kinerja yang menjadi amanah RPJMN ke IV Tahun 2022-2024 dan mendukung pencapaian program-program prioritas Kementerian Hukum dan HAM.

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi selain mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, juga mengikuti dan mengadopsi perkembangan terkini dan best practice mengenai peran dan fungsi lembaga pengawasan internal lainnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mengimplementasikan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan system pengendalian internal yang kuat melalui :

- a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian internal yang berkelanjutan Pelaksanaaudit kinerja, audit kepatuhan (compliance) dan audit investigasi yang berfokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
- b. Pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas operasi, pemerintahan yang baik dan manajemen risiko.
- c. Pelaksana pendampingan/ rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan dan reviu Laporan Keuangan dalam rangka menjamin kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM.
- d. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengawasan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akhir Tahun 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban/akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, pelaporan ini bertujuan untuk :


1. Memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selama satu tahun termasuk capaian kinerjanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan masukan dan bahan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada tahun berikutnya.

## **C. RUANG LINGKUP**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selama Tahun 2023 meliputi capaian sasaran dan target Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kegiatan, Target Kinerja, Perjanjian Kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), penyelenggaraan SPIP, penyelenggaraan Manajemen Risiko, pelaksanaan SAKIP, implementasi Program Unggulan dan capaian lainnya serta rangkuman kegiatan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk kegiatan dukungan manajemen) yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Jenderal selama Tahun 2023.

## **D. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;

- 
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
  8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s.d. 2024;
  10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
  11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2022 tanggal 30 September tahun 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM
  12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.OT.01.01 Tahun 2022 tanggal 30 September Tahun 2022 tentang Manual Indikator Kinerja Utama kementerian Hukum dan HAM.
  13. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021-2024.

## BAB. II

### KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

#### A. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Dalam RPJMN ke IV Tahun 2022-2024 bahwa Presiden terpilih menyampaikan hanya ada satu visi dan misi yaitu Visi Misi Presiden yang capaian targetnya diturunkan ke dalam program Kementerian/Lembaga/Pemda. Visi dan Misi Presiden sebagai berikut :



Gambar 2.1 Visi dan Misi Presiden

Setiap Visi dan Misi Kementerian maupun Lembaga selaras dan mendukung Visi dan Misi Presiden. Untuk mendukung Visi dan Misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini:

### VISI DAN MISI

**VISI**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam pelaksanaan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

**MISI**

Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

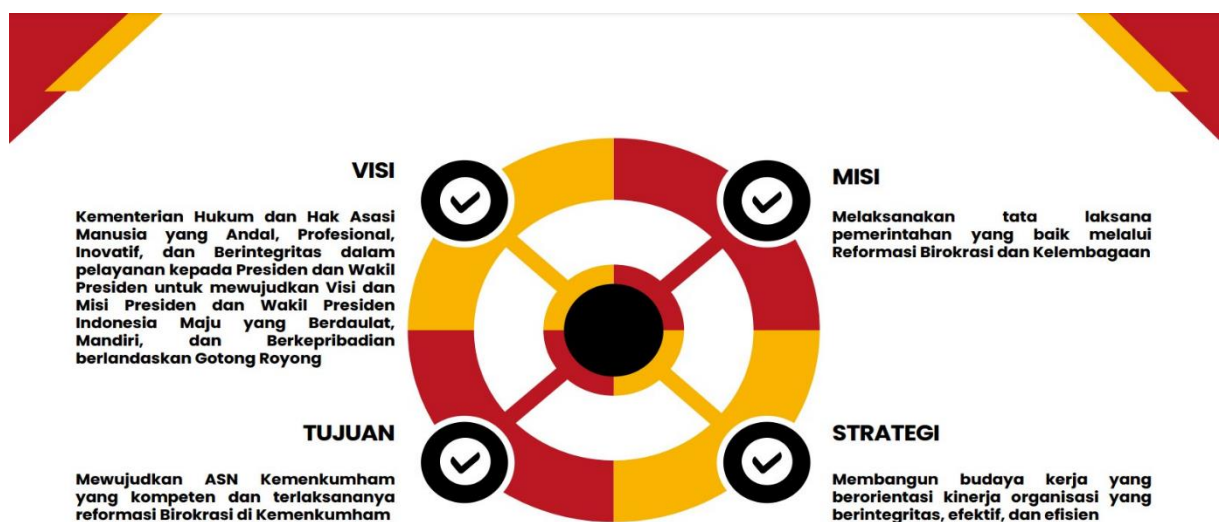
Gambar 2.2 Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia





**Gambar 2.3 Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

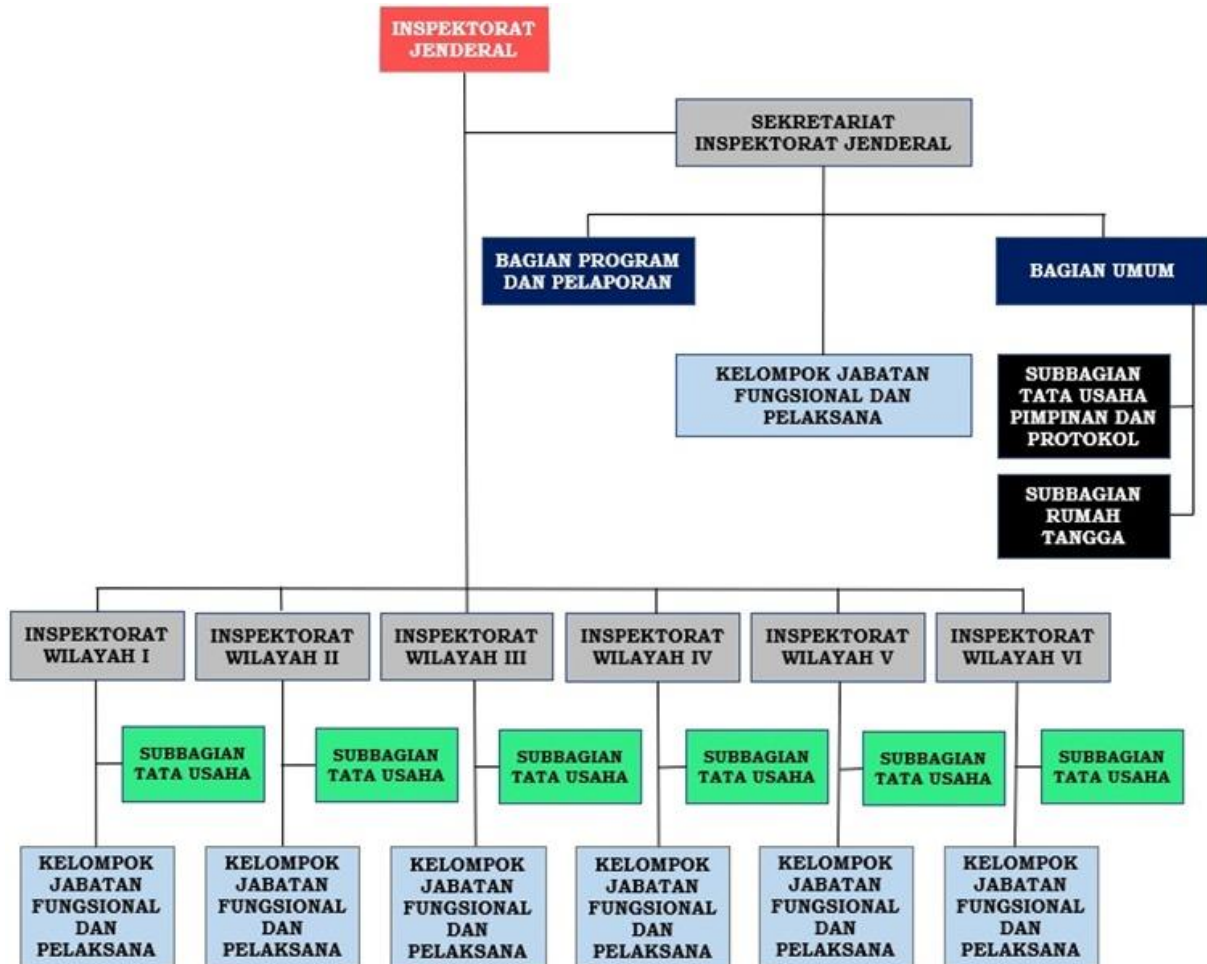
Berdasarkan gambar tersebut di atas, Inspektorat Jenderal melaksanakan Misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu “Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan” dengan tujuan ‘Terbangunnya Budaya Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien’. Untuk mencapai tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal mengusung strategi yaitu “Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien” sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM.



**Gambar 2.4 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM**

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 325 dan Pasal 326 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023, Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

### 1. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 2. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

## 3. Inspektorat Wilayah I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

## 4. Inspektorat Wilayah II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

#### 5. Inspektorat Wilayah III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

#### 6. Inspektorat Wilayah IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

#### 7. Inspektorat Wilayah V

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

#### 8. Inspektorat Wilayah VI

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu

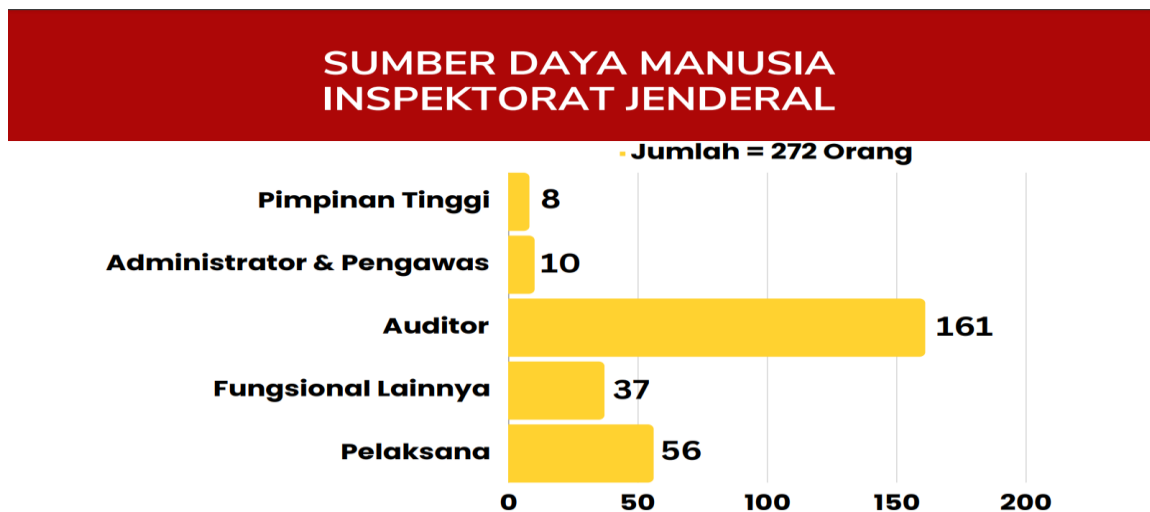
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Ilmu Imigrasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah VI terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

## C. SUMBER DAYA

### 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan atas tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM didukung oleh 272 orang dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2.6 Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal

Selain itu dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai dengan Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan, Aktif Belajar, *focus group discussion*, workshop yang diikuti oleh pegawai Inspektorat Jenderal.

### 2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan kerja dan perwujudan kinerja s.d berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Jenderal didukung dengan anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.02-0/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp69.026.935.000 (enam puluh sembilan miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan telah

mengalami 12 (dua belas) kali revisi DIPA.

Berdasarkan data SAKTI dengan metode kas basis (SP2D), realisasi anggaran belanja keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp66.835.230.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 96,8% dari total PAGU Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**(Realisasi Anggaran Tahun 2023 Per Jenis Belanja)**

Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	
	DIPA	Jumlah	%
Belanja Pegawai	Rp20.272.309.000	Rp18.273.759.000	90,14
Belanja Barang	Rp44.722.647.000	Rp44.537.246.000	99,59
Belanja Modal	Rp4.031.979.000	Rp4.024.225.000	99,81
Jumlah	Rp69.026.935.000	Rp66.835.230.000	96,82

**Tabel 2.8**  
**(Realisasi Anggaran Tahun 2023 Per Program/Kegiatan)**

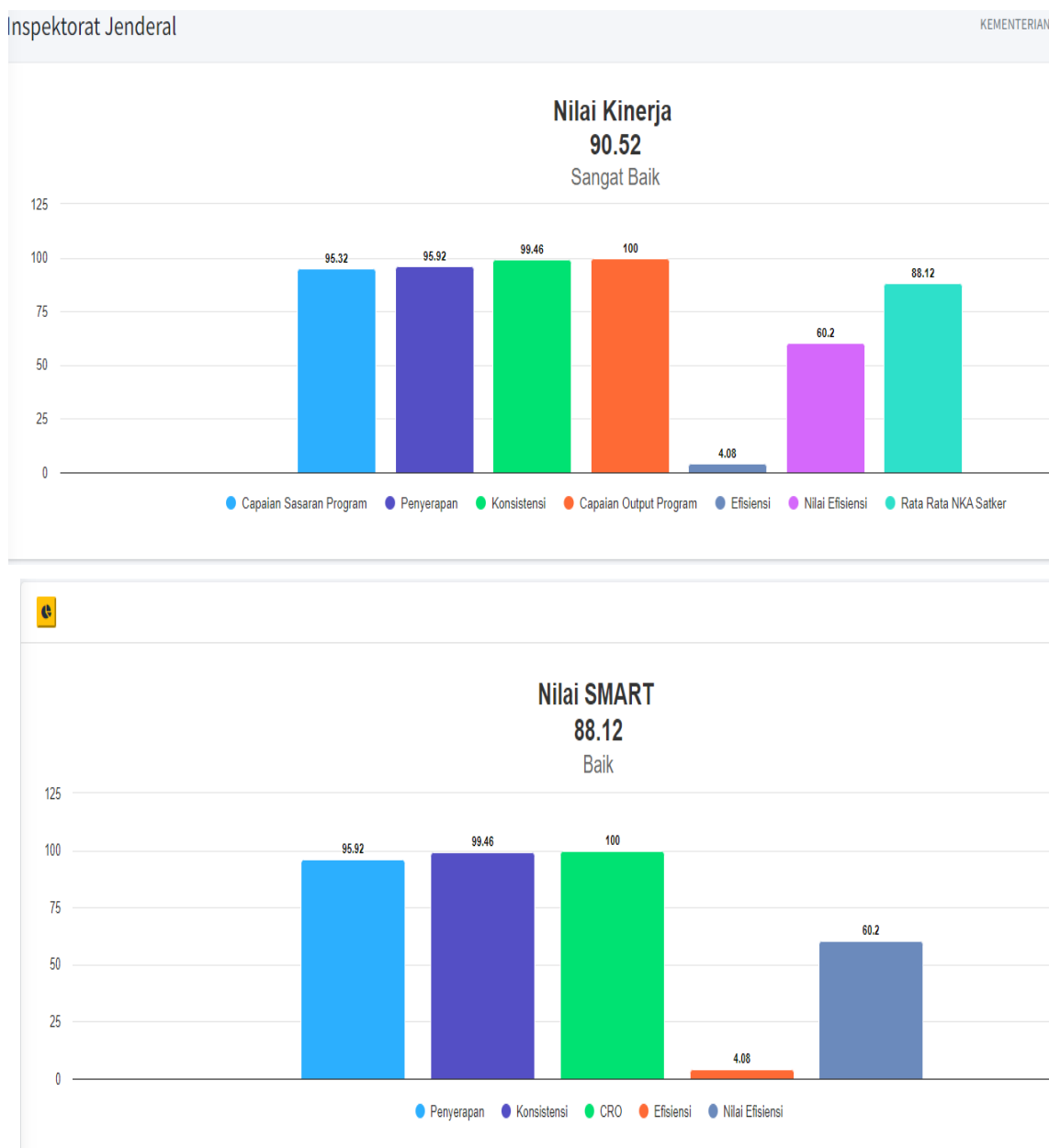
Per Kegiatan	PAGU	Realisasi	
		Jumlah	%
Inspektorat Wilayah I	Rp4.429.775.000	Rp4.421.610.000	99,82%
Inspektorat Wilayah II	Rp4.429.775.000	Rp4.417.319.000	99,72%
Inspektorat Wilayah III	Rp4.429.775.000	Rp4.402.332.000	99,38%
Inspektorat Wilayah IV	Rp4.429.775.000	Rp4.416.338.000	99,70%
Inspektorat Wilayah V	Rp4.429.775.000	Rp4.426.039.000	99,92%
Inspektorat Wilayah VI	Rp4.429.775.000	Rp6.100.526.000	99,50%
Sekretariat Inspektorat Jenderal	Rp40.777.534.000	Rp40.777.534.000	94,86%
Jumlah	Rp69.026.935.000	Rp66.835.230.000	96,82%

**a. Capaian Kinerja Anggaran (IKPA)**

Berdasarkan data SAKTI dengan metode kas basis (SP2D), realisasi anggaran belanja keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp66.835.230.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 96,8% dari total PAGU Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023. Dengan anggaran tersebut dibandingkan dengan jumlah satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (881 Satuan Kerja) yang dilakukan

pengawasan, mengharuskan Inspektorat Jenderal menentukan prioritas kegiatan agar efisiensi pemanfaatan anggaran dapat digunakan kepada hal yang diutamakan untuk mengawal mencapai visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam aplikasi monev smart kinerja anggaran pada website <https://smart.kemenkeu.go.id/> bahwa efisiensi anggaran Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.9**  
**(Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART per tanggal 31 Desember 2023)**

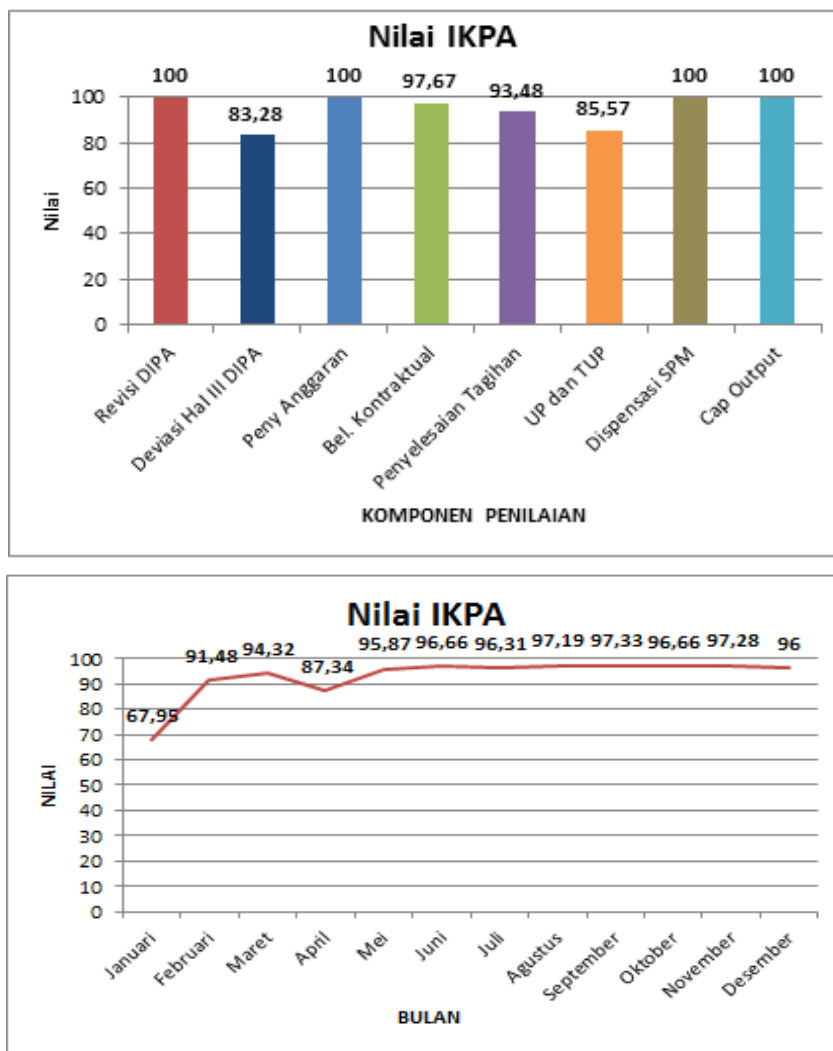


Bahwa Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal pada Aplikasi SMART sebesar 90,52 (Sangat Baik). Nilai kinerja masih dapat meningkat s.d. penyelesaian hasil realisasi atas Capaian Sasaran Program, Penyerapan (hasil rekonsiliasi), Konsistensi, Capaian Output Program, Efisiensi, dan Nilai Efisiensi.

Adapun Nilai SMART sebesar 88,12 (Baik) yang mana terdiri dari Indeks Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar 20 mengandung penjelasan bahwa terdapat pencapaian realisasi pemanfaatan anggaran output program dan anggaran output kegiatan Inspektorat Jenderal lebih efisien dengan Nilai Efisiensi sebesar 100. Dengan catatan bahwa Indeks efisiensi anggaran dalam aplikasi SMART mempunyai nilai maksimum 20% dan nilai minimum -20% (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02.2021).

Sedangkan prolehan nilai IKPA s.d Desember 2023 sebesar 96 dengan kategori nilai IKPA  $89 < 96 > 95$  sangat baik.

**Gambar 2.10**  
**(Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA))**





### 3. SUMBER DAYA PERATURAN

Inspektorat Jenderal selama Tahun 2023, mengajukan program penyusunan perundang-undangan melalui ijin prakarsa sebagai berikut :

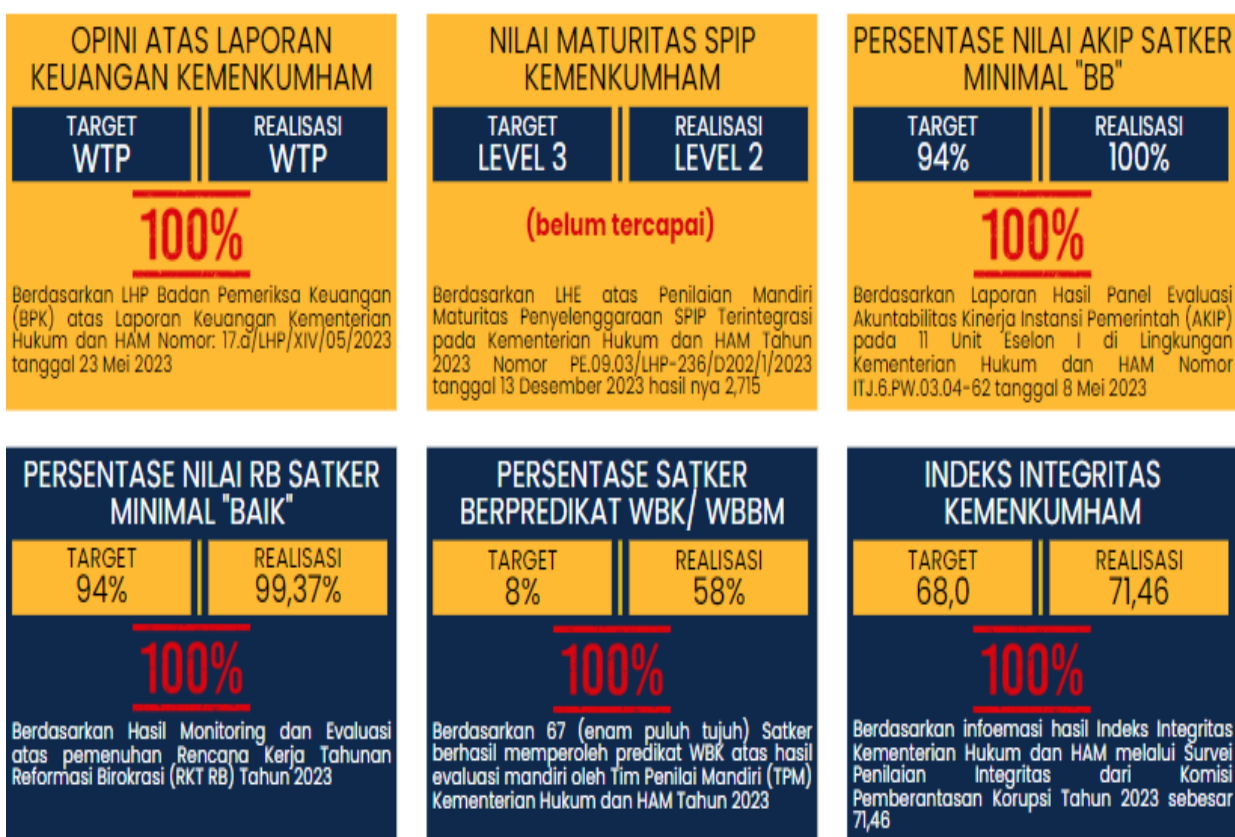
- a. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin, dan telah terbit Permenkumham No. 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


## BAB. III HASIL YANG DICAPAI

### A. CAPAIAN KEGIATAN

Pada Tahun 2023, capaian kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023, pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Jenderal**





Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa sampai dengan periode penyusunan LKjIP Tahun 2023, dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 5 (lima) IKU tercapai 100% atau melebihi target yaitu indikator Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Persentase Nilai AKIP Satuan Kerja Minimal “BB”, Persentase Nilai RB Satuan Kerja Minimal “Baik”, Persentase Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM, dan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mansuia. Sedangkan 1 (satu) IKU belum memenuhi target yaitu indikator Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait IKU yang belum tercapai, dalam pelaksanaannya Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan berbagai upaya untuk pencapaiannya. Namun beberapa faktor, khususnya faktor eksternal tidak dapat di kendalikan seperti halnya nilai eksper pada indikator Indeks Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan nilai komponen pengurang pada nilai Maturitas SPIP Terintegrasi

## 1. Capaian Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I s.d. VI

PK/IKK	ITWIL I		ITWIL II		ITWIL III		ITWIL IV		ITWIL V		ITWIL VI	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKK-1: Level IACM/Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja	78%	92,85%	33%	41,66%	60%	65,91%	60%	74,07%	45%	66,67%	40%	40,74%
IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara	50%	60,23%	85%	100%	20%	24,04%	50%	82,70%	1%	100%	45%	59,37%
IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi	70%	76,33%	70%	77,63%	54%	55,96%	60%	70,28%	80%	80%	50%	58,61%

PK/IKK	ITWIL I		ITWIL II		ITWIL III		ITWIL IV		ITWIL V		ITWIL VI	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi												
IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara	85%	100%	70%	85,43%	6%	6,12%	12%	15,02%	43%	91,99%	15%	16,41%
IKK-6: Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi	38%	64,71%	30%	55,76%	20%	20%	66%	78%	80%	92,15%	55%	55,22%
IKK-7: Persentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8%	6%	8%	6%	8%	7%	8%	5%	8%	5%	8%	6%
IKK-8: Level Maturitas SPIP Kemenkumham	3,5	4,024	3,5	4,024	3,5	4,024	3,5	4,024	3,5	4,024	3,5	4,024

## 2. Capaian Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

PK/IKK	Target	Realisasi
Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM untuk Meningkatkan Integritas Kemenkumham	1 rekomendasi	1 rekomendasi
Indeks Persepsi Integritas	68,0	71,46 Indeks (Hasil penilaian KPK untuk seluruh K/L/P akan diterbitkan tanggal 24 Januari 2024)
Indeks RB ITJEN	34,93	100% (Berdasarkan hasil moneyv RKT RB tahun 2023)
Nilai SAKIP ITJEN "Baik	82,90	84,05
Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	88%	95,26%
Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	4	4,1088
Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal	85%	100%
Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel	88%	92,63%
Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal	12	12
Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	WTP	WTP
Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal	90%	96,82%
Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti	97%	100%

### 3. Capaian Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

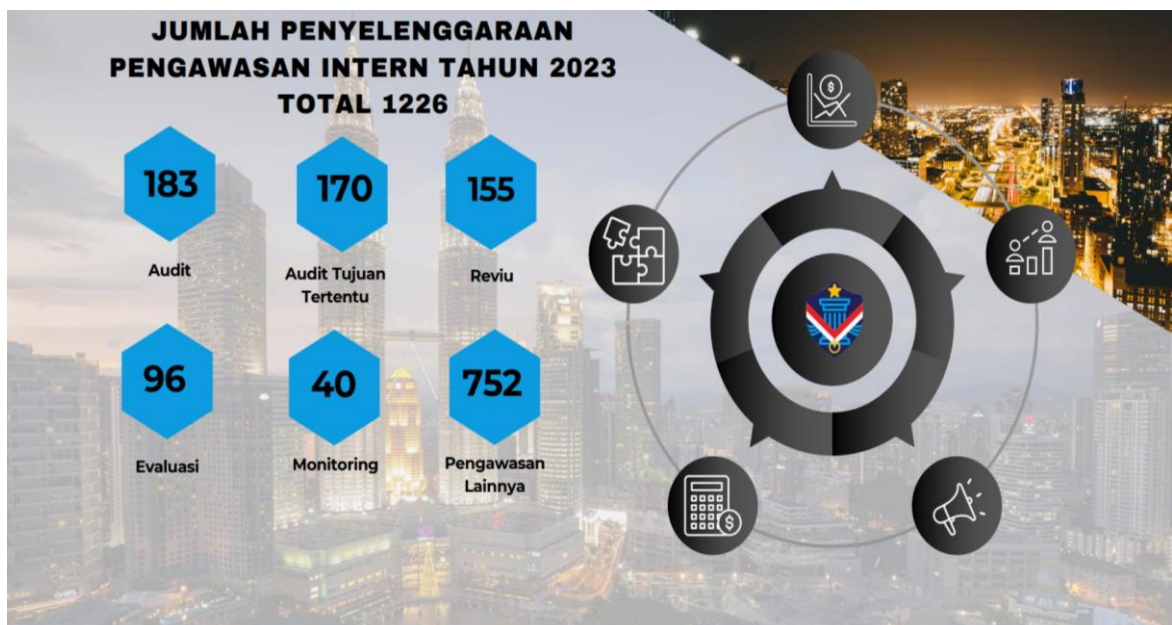
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal pada Aplikasi Target Kinerja Tahun 2023 dapat terlihat bahwa kinerja Inspektorat Jenderal:

- Seluruhnya terpenuhi dan terverifikasi s.d Triwulan III Tahun 2023 dengan perolehan nilai verifikasi yang maksimal;
- Seluruhnya terpenuhi Triwulan IV Tahun 2023 dan sedang menunggu nilai verifikasi dari Sekretariat Jenderal.

**Gambar 3.2**  
**(Hasil Penilaian Kinerja pada Aplikasi Target Kinerja Tahun 2023)**



### 4. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah



## B. AUDIT

### 1. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan terhadap peraturan. Audit kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi. Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan audit kinerja dan dari hasil audit tersebut terdapat sejumlah temuan dan rekomendasi yang dikelompokkan sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3 Temuan Hasil Audit Kinerja APIP**

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	322	Rp3.405.968.090,49
1.01	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	142	Rp3.022.981.298,49
1.01.01	Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif	2	Rp60.439.300,00
1.01.02	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2	Rp300.424.046,86
1.01.03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	37	Rp1.455.017.733,64
1.01.04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	60	Rp859.166.046,84
1.01.05	Pemahalan harga (Mark up)	2	Rp72.265.939,00
1.01.06	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	0	Rp-
1.01.07	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	5	Rp12.155.185,00



Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1.01.08	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	9	Rp37.002.875,15
1.01.09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	25	Rp226.510.172,00
1.01.10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	0	Rp-
1.01.11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	0	Rp-
1.01.12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	0	Rp-
1.01.13	Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	0	Rp-
1.01.14	Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan	0	Rp-
1.01.15	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	0	Rp-
1.01.16	Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan	0	Rp-
1.01.17	Penentuan HPP (harga pokok pembelian) terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya	0	Rp-
1.01.18	Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan	0	Rp-
1.01.19	Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif	0	Rp-
<b>1.02</b>	<b>Potensi kerugian negara/daerah</b>	<b>22</b>	<b>Rp169.932.100,00</b>

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
	<b>atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah</b>		
1.02.01	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	9	Rp-
1.02.02	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	11	Rp-
1.02.03	Aset dikuasai pihak lain	0	Rp-
1.02.04	Pembelian aset yang berstatus sengketa	0	Rp-
1.02.05	Aset tidak diketahui keberadaannya	0	Rp-
1.02.06	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1	Rp-
1.02.07	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	1	Rp-
1.02.08	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	0	Rp-
1.02.09	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	0	Rp-
1.02.10	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	0	Rp-
<b>1.03.00</b>	<b>Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah</b>	<b>29</b>	<b>Rp182.611.263,00</b>
1.03.01	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan	19	Rp171.064.055,00

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
	belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah		
1.03.02	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	1	Rp-
1.03.03	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah	0	Rp-
1.03.04	Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	0	Rp-
1.03.05	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	9	Rp-
1.03.06	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	0	Rp-
1.03.07	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	0	Rp-
<b>1.04.00</b>	<b>Administrasi</b>	<b>129</b>	<b>Rp30.443.429,00</b>
1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	62	Rp29.232.989,00
1.04.02	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	0	Rp-
1.04.03	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	33	Rp-
1.04.04	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	0	Rp-
1.04.05	Pelaksanaan lelang secara performa	0	Rp-
1.04.06	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik	25	Rp-

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
	negara/daerah/Perusahaan		
1.04.07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	3	Rp-
1.04.08	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	0	Rp-
1.04.09	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	0	Rp-
1.04.10	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	0	Rp-
1.04.11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	0	Rp-
1.04.12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	0	Rp-
1.04.13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	0	Rp-
1.04.14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	Rp-
1.04.15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	4	Rp-
1.04.16	Pelampauan pagu anggaran	0	Rp-
<b>1.05.00</b>	<b>Indikasi tindak pidana</b>	<b>0</b>	<b>Rp-</b>
1.05.01	Indikasi tindak pidana korupsi	0	Rp-
1.05.02	Indikasi tindak pidana perbankan	0	Rp-
1.05.03	Indikasi tindak pidana perpajakan	0	Rp-
1.05.04	Indikasi tindak pidana kepabeanan	0	Rp-

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1.05.05	Indikasi tindak pidana kehutanan	0	Rp-
1.05.06	Indikasi tindak pidana pasar modal	0	Rp-
1.05.07	Indikasi tindak pidana khusus lainnya	0	Rp-
<b>2</b>	<b>Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	<b>367</b>	<b>Rp45.545.660,00</b>
<b>2.01</b>	<b>Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan</b>	<b>135</b>	<b>Rp12.104.749,00</b>
2.01.01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	86	<b>Rp12.104.749,00</b>
2.01.02	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	27	Rp-
2.01.03	Entitas terlambat menyampaikan laporan	3	Rp-
2.01.04	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	15	Rp-
2.01.05	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	4	Rp-
<b>2.02</b>	<b>Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja</b>	<b>41</b>	<b>Rp-</b>
2.02.01	Perencanaan kegiatan tidak memadai	9	Rp-
2.02.02	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	7	Rp-
2.02.03	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	8	Rp-

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
2.02.04	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	Rp-
2.02.05	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2	Rp-
2.02.06	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya /belanja	1	Rp-
2.02.07	Kelemahan pengelolaan fisik aset	13	Rp-
<b>2.03</b>	<b>Kelemahan struktur pengendalian intern</b>	<b>191</b>	<b>Rp33.440.911,00</b>
2.03.01	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	40	Rp-
2.03.02	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	113	Rp1.050.000,00
2.03.03	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	4	Rp-
2.03.04	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	24	Rp2.390.911,00
2.03.05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	10	Rp30.000.000,00
<b>3</b>	<b>Temuan 3E</b>	<b>37</b>	<b>Rp1.520.000,00</b>
<b>3.01</b>	<b>Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan</b>	<b>3</b>	<b>Rp-</b>
3.01.01	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1	Rp-
3.01.02	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	0	Rp-

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
3.01.03	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	2	Rp-
<b>3.02</b>	<b>Ketidakefisienan</b>	<b>2</b>	<b>Rp-</b>
3.02.01	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	0	Rp-
3.02.02	Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya	2	Rp-
<b>3.03</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>32</b>	<b>Rp1.520.000,00</b>
3.03.01	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2	Rp1.520.000,00
3.03.02	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	8	Rp-
3.03.03	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	Rp-
3.03.04	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	0	Rp-
3.03.05	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	6	Rp-
3.03.06	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	9	Rp-
3.03.07	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	6	Rp-
3.03.08	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	0	Rp-

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
-	Blanks (tidak tercantum kode temuan pada LHP maupun JUKTIB)	20	Rp253.821.822,00
<b>Jumlah Kejadian</b>		<b>746</b>	<b>Rp3.706.855.572,49</b>

**Tabel 3.4 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP**

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat	106	Rp3.043.046.555,89
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	0	Rp-
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	32	Rp36.966.830,17
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	10	Rp-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	15	Rp39.335.036,00
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	221	Rp74.409.164,00
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	48	Rp13.342.783,00
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	14	Rp-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	201	Rp8.314.260,00
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	4	Rp-
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	13	Rp-



No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4
12	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	0	Rp-
13	Pelaksanaan sosialisasi	49	Rp6.768.720,00
14	Lain-lain	13	Rp-
	Blanks (tidak tercantum kode rekomendasi pada LHP maupun JUKTIB)	94	Rp484.672.223,43
<b>Jumlah Rekomendasi</b>		<b>820</b>	<b>Rp3.706.855.572,49</b>

## 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu/Audit Khusus/Audit Investigatif

Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu dan/atau Audit Khusus sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Realisasi Audit Tujuan Tertentu dan/atau Audit Khusus**

No	Kegiatan ATT	Non PKPT	
		REALISASI ATT	
		Jumlah OP	Jumlah dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4
1.	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah I	-	Rp-
2.	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah II	42	Rp651.553.221
3.	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah III	3	Rp-
4.	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah IV	7	Rp-
5.	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah V	-	Rp-
6.	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah VI	12	Rp-

Realisasi Audit Investigatif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada tahun 2023 terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6 Realisasi Audit Investigatif terkait Tindak Pidana Korupsi**

No	Jenis	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH I s.d VI		
1	Jumlah Objek audit investigative	0
2	Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	0
3	% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	0

Untuk hasil audit investigatif yang terindikasi tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.7 Realisasi Audit Investigatif Yang Dilimpahkan ke Pihak Penyidik**

Instansi Penyidik	Kasus	Potensi Kerugian Negara (Rp)
INSPEKTORAT WILAYAH I s.d VI		
Kepolisian	0	0
Kejaksaan	0	0
KPK	0	0
Jumlah	0	0

Tindak lanjut kasus oleh instansi penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.8 Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik**

Status	Kasus	Potensi Kerugian Negara (RP)	Keterangan
INSPEKTORAT WILAYAH I s.d VI			
Penyelidikan	0	0	0
Penyidikan	0	0	0
Dihentikan	0	0	0
Dilimpahkan ke pengadilan	0	0	0
Penuntutan	0	0	0
Diputus*)	0	0	0
Jumlah	0	0	0

**Tabel 3.9 Kode etik dan Standar Audit Minimal Yang Digunakan**  
**Kode Etik dan Standar Audit Minimal yang Digunakan**

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-undangan
1. Peraturan SAIPI No.PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Interen pemerintah Indonesia	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia



	<p>Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025;</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;</p>
--	---



	<ol style="list-style-type: none"><li>17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;</li><li>18. Kepmenpan RB Nomor 739 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023</li><li>19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1360);</li><li>20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);</li><li>21. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);</li><li>23. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ-01.PR.01 .01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024;</li><li>24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242);</li></ol>
--	---

	<p>25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);</p> <p>26. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 332/KM.6/2016 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga;</p> <p>27. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2125);</p>
--	---

### C. REVIU

Reviu atas laporan keuangan hasilnya berupa Pernyataan Telah Direviu Tanpa Paragraf Penjelas dan Pernyataan Telah Direviu Dengan Paragraf Penjelas sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.10 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Laporan Keuangan (LK)**

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	1
Jumlah objek yang direviu	1
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	0

**Tabel 3.11 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Rencana Kerja Barang Milik Negara (RKBMN)**

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	2
Jumlah objek yang direviu	2
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	0

**Tabel 3.12 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu  
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)**

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	1
Jumlah objek yang direviu	1
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	0

**Tabel 3.13 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu  
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH I	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	30
Jumlah objek yang direviu	30
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	0
INSPEKTORAT WILAYAH V	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	1
Jumlah objek yang direviu	1
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	0

**Tabel 3.14 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Lainnya**

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH I	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	0
Jumlah objek yang direviu	0
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	0
INSPEKTORAT WILAYAH II	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	14
Jumlah objek yang direviu	14
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	14
INSPEKTORAT WILAYAH III	

Keterangan	Jumlah
Jumlah objek yang seharusnya direviu	13
Jumlah objek yang direviu	13
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	0
<b>INSPEKTORAT WILAYAH IV</b>	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	0
Jumlah objek yang direviu	0
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	0
<b>INSPEKTORAT WILAYAH V</b>	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	0
Jumlah objek yang direviu	0
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	0
<b>INSPEKTORAT WILAYAH VI</b>	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	8
Jumlah objek yang direviu	8
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	0

#### D. EVALUASI

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Manajemen Risiko. Adapun hasil dari masing-masing evaluasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari penilaian mandiri, penjaminan kualitas, dan evaluasi. Penilaian mandiri menjadi tanggung jawab dari manajemen organisasi, penjaminan kualitas dilaksanakan oleh APIP, dan evaluasi dilaksanakan oleh BPKP.



**a. Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023**

Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2023 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa Penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi kriteria pada tingkat “Terkelola dan Terukur” dengan skor sebesar 4,677. Kemudian, penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2023 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 4,024 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 4 (Terkelola dan Terukur)
- 2) Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 4,054 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 4 (Terkelola dan Terukur)
- 3) Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 4,160

**Tabel 2. 1 Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi**

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjaminan Kualitas	Naik/Turun
1.	Maturitas penyelenggaraan SPIP	4,677	4,024	-0,653
2.	MRI	4,462	4,054	-0,408
3.	IEPK	4,000	4,160	0,160

Dengan tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

**b. Hasil Evaluasi BPKP Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Nomor PE.09.03/LHP-157/D202/2/2023 Tanggal 20 September 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Nomor PE.09.03/SP-282/D2/02/2023 Tanggal 29 Desember 2023 dari BPKP, hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP


Terintegrasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023**

lo.	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2022	Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2023	Naik/(Turun)
1	2	3	4	5 = 4-3
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2,983	2,715	(0,268)
2.	Manajemen Risiko Indeks	2,853	2,468	(0,385)
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,742	1,744	(0,998)


Terkait dengan hasil evaluasi BPKP tahun 2022, BPKP memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Mendorong perbaikan indikator kinerja pada penetapan tujuan yang belum berorientasi pada outcome dan memenuhi kriteria SMART.
- 2) Mempertimbangkan target pada Renstra dan realisasi kinerja tahun sebelumnya dalam penetapan target kinerja Rencana Kerja/Perjanjian Kinerja.
- 3) Atas subunsur yang skornya masih di bawah 3 agar melengkapi bukti parameter SPIP yang memenuhi syarat implementasi atas kebijakankebijakan Kemenkumham.
- 4) Atas subunsur yang skornya di atas 3 agar melengkapi bukti parameter SPIP level 4 yaitu bukti pelaksanaan evaluasi yang memenuhi syarat dilakukan secara berkala, terdokumentasi, dilakukan untuk menangani residual risk, hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, dan perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik.
- 5) Pada pencapaian tujuan:
  - a) Pada aspek keandalan pelaporan keuangan agar bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal untuk memperbaiki pengendalian agar tidak terjadi temuan yang berulang.
  - b) Pada tujuan pengamanan aset, agar:
    - (1)Mendorong penyelesaian permasalahan terkait aset tanah di Pulau Nusa Kambangan agar tidak menjadi temuan berulang oleh BPK terkait aset tanah di Pulau Nusa Kambangan.

- 
- (2) Memastikan seluruh aset yang dimiliki Kemenkumham berfungsi baik dan aman.
  - c) Pada tujuan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, ke depannya agar memastikan jumlah temuan ketidakpatuhan BPK  $\leq 5$  dalam tahun anggaran terakhir dan tidak mempengaruhi opini BPK.
  - 6) Dalam rangka peningkatan Manajemen Risiko Indeks (MRI), mendorong:
    - a) Proses manajemen risiko atas pengambilan keputusan oleh pimpinan unit kerja, rencana tindak pengendalian, pengomunikasiannya, reviu internal, dan terintegrasi dengan proses bisnis di tingkat operasional maupun tingkat strategis.
    - b) Adanya indikator kinerja terkait manajemen risiko.
    - c) Peningkatan kesadaran pegawai terkait manajemen risiko.
    - d) Proses identifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan.
    - e) Pemantauan/monitoring terhadap keterjadian risiko.
    - f) Evaluasi efektivitas tindak pengendalian yang dilakukan untuk menangani risiko.
  - 7) Dalam rangka peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), mendorong:
    - a) Tersusunnya peta risiko korupsi secara lebih memadai.
    - b) Mengevaluasi, menyempurnakan, dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang sudah ada secara berkala agar dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon.
    - c) Kegiatan edukasi/pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal pada seluruh unit kerja.
    - d) Unit kerja secara berkala mengevaluasi efektivitas implementasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko korupsi.
  - 8) Menambah sampel satker-satker teknis pada proses penilaian mandiri seperti lembaga pemasyarakatan dan kantor imigrasi.
  - 9) Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang ada pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

Dan Terkait dengan hasil evaluasi BPKP tahun 2023, BPKP memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Dalam menetapkan indikator dan target kinerja agar memenuhi kriteria SMART;
- 2) Melakukan perbaikan perencanaan sebagaimana rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP KemenPANRB;

- 
- 3) Melakukan evaluasi berkala atas seluruh kebijakan dan implementasi kebijakan berkaitan dengan pengendalian intern (25 sub unsur SPIP), serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi;
  - 4) Berkaitan dengan manajemen risiko:
    - a) Meningkatkan pemahaman manajemen risiko untuk seluruh pegawai secara menyeluruh;
    - b) Memastikan implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap risiko operasional unit kerja dan RTP terhadap risiko strategis unit kerja secara memadai, serta melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi RTP;
    - c) Menggunakan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh Unit Pemilik Risiko (UPR);
    - d) APIP agar melakukan monitoring dan evaluasi implementasi RTP oleh Satuan Kerja.
  - 5) Mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan mekanisme survei kepuasan masyarakat dengan mendasarkan pada kinerja masing-masing Satuan Kerja, yaitu menetapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan layanan Satuan Kerja, serta melakukan upaya penguatan pengendalian untuk memastikan responden yang mengisi survei adalah orang yang menerima layanan;
  - 6) Melakukan penguatan pengendalian untuk mengurangi permasalahan berulang, terutama pada sektor Pemasyarakatan dan Keimigrasian;
  - 7) Melakukan penguatan pengendalian atas aspek-aspek yang masih menjadi catatan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK;
  - 8) Memperkuat dan mempertahankan integritas melalui internalisasi keterkaitan penguatan integritas dengan leveling SPIP dalam rangka pencapaian WBK/WBBM yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai.

## 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Laporan Hasil Panel Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 11 (Sebelas) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Nomor ITJ.6.PW.03.04-62 tanggal 8 Mei 2023 dapat dijelaskan bahwa:

- a. Hasil penilaian evaluasi secara berjenjang yang dilaksanakan menggunakan aplikasi Evaluasi Kinerja Berbasis Elektronik (EKIBE) terhadap 11 (sebelas) Unit Eselon I menghasilkan nilai sebagai berikut:
  - 1) Nilai akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian berdasarkan hasil *self assessment* masing-masing Unit Eselon I memperoleh rata-rata nilai sebesar 93,84 dengan predikat AA.

- 2) Nilai akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian berdasarkan hasil *on desk* evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Inspektorat Jenderal memperoleh rata-rata nilai sebesar 84,31 dengan predikat A.
- 3) Nilai akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian berdasarkan hasil panel evaluasi Inspektorat Jenderal memperoleh rata-rata nilai sebesar 81,60 dengan predikat A.
- b. Pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara umum telah dilakukan, baik secara formal dan substansi dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, perumusan indikator kinerja, penyusunan laporan kinerja, serta telah berupaya untuk melakukan evaluasi kinerja internal secara berkala.
- c. Terdapat 9 (sembilan) Unit Eselon I yang mendapatkan predikat A (memuaskan) dan 2 Unit Eselon I memperoleh predikat BB (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.18 Hasil Panel Evaluasi AKIP Pada 11 Unit Eselon I**

No	Unit Eselon I	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat
1.	Sekretariat Jenderal	82,25	A
2.	Inspektorat Jenderal	84,05	A
3.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	83,00	A
4.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	82,85	A
5.	Direktorat Jenderal Imigrasi	80,00	BB
6.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	84,80	A
7.	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	82,40	A
8.	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	76,10	BB
9.	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80,90	A
10.	Badan Pembinaan Hukum Nasional	80,15	A
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Hak Asasi Manusia	81,20	A
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Hukum dan HAM</b>		<b>81,60</b>	<b>A</b>

- d. Perolehan nilai capaian kinerja rata-rata tersebut menginterpretasikan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah “Memuaskan”, yaitu dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan

berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

- e. Masih terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan pemenuhan aspek keberadaan, aspek kualitas, dan aspek pemanfaatan pada masing-masing komponen belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
  - 2) Pelaksanaan teknis pelaksanaan penilaian mandiri secara berjenjang perlu dilaksanakan sampai dengan tingkat satuan kerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
  - 3) Perlu dilaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja oleh masing-masing Unit Eselon I, sehingga terdapat perbaikan dan jaminan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Nomor B/55/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai AKIP Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 sebesar 77,89 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada Kementerian dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 3.19 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023**

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,39	23,42
b. Pengukuran Kinerja	30	23,28	23,37
c. Pelaporan Kinerja	15	11,67	11,71
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,20	19,39
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>77,54</b>	<b>77,89</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>

### 3. Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi

Pada awalnya, evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Fokus dari PMPRB adalah 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. PMPRB dilaksanakan oleh satuan kerja/unit kerja yang hasilnya direviu oleh Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal setelah selesai melakukan reviu hasil PMPRB di satuan kerja/unit kerja, melakukan kompilasi PMPRB di satuan kerja/unit kerja dan instansi. Kompilasi PMPRB di satuan kerja/unit kerja dan instansi menjadi hasil PMPRB instansi pemerintah dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. Hasil PMPRB disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil PMPRB akan dilakukan evaluasi eksternal terhadapnya untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi mengalami perubahan pasca berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi tahun 2023 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan data dukung RKT RB tahun 2023, persentase pemenuhan data dukung RKT RB oleh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah mencapai 100% sedangkan persentase pemenuhan data dukung RKT RB oleh Unit Pelaksana Teknis mencapai 98,1%. Dengan demikian, realisasi persentase nilai reformasi birokrasi satker minimal BB dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(100\% + 100\% + 98,1\%) : 3 = 99,37\%$$

Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu perlu adanya regulasi tata kelola pengendalian RB pada tingkat Kantor Wilayah dan Satuan Kerja, mekanisme penyampaian laporan pengendalian oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja, fasilitasi konsultasi secara langsung dari Kantor Wilayah maupun Satuan Kerja ke Inspektorat Jenderal, kegiatan penguatan bagi calon verifikator data dukung pada Kantor Wilayah, asistensi pada pra-verifikasi oleh evaluator, dan pemberian *reward* dan *punishment* terhadap capaian.

#### 4. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 387 Tahun 2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang menjadi Proyek Percontohan dan wajib untuk melakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara Mandiri.


Oleh karena itu melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Tim Penilai Mandiri (TPM) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Tahun 2023, dibentuk Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri atas unsur Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Badan Strategis Kebijakan Hukum dan HAM.

Tugas dari Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terhadap 74 (tujuh puluh empat) satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara Mandiri dan berdasarkan standar serta aturan dari Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

Tujuan dari Panel TPM Terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LKE), Hasil Desk Evaluasi Wawancara dan Observasi Lapangan Tim Penilai Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa TPM Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penilaian terhadap satuan kerja usulan berpredikat menuju WBK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-10.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum





dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan Panel terhadap 74 (tujuh puluh empat) usulan satuan kerja berpredikat menuju WBK.

Berdasarkan Rapat Hasil Panel Tim Penilai Mandiri Satuan Kerja Usulan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, 67 (enam puluh tujuh) satuan kerja dinyatakan lulus Panel Tim Penilai Mandiri (TPM) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Sementara itu, 7 (tujuh) satuan kerja dinyatakan tidak lulus Panel Tim Penilai Mandiri (TPM) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

Kemudian, kesepakatan dari Rapat Hasil Panel Tim Penilai Mandiri Satuan Kerja Usulan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 tersebut disampaikan kepada Menteri PANRB melalui Surat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-OT.03.03-103 tanggal 30 Oktober 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK Secara Mandiri. Kementerian PANRB memberikan tanggapan atas hasil evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/89/PW.04/2023 tanggal 23 November 2023 hal Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian PANRB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM memberikan data catatan *clearance* dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan unit/satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK Mandiri. Catatan data *clearance* dari KPK menjadi faktor penggugur dalam penetapan predikat WBK/WBBM oleh TPN. Pada catatan *clearance* tersebut, 67 (enam puluh tujuh) unit/satuan kerja yang memenuhi predikat WBK berdasarkan hasil penilaian dari TPM tidak memiliki catatan dari KPK, ORI, dan BIN. Atas dasar hal tersebut, 67 (enam puluh tujuh) unit/satuan kerja yang memenuhi predikat WBK berdasarkan hasil penilaian dari TPM ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai unit/satuan kerja berpredikat WBK. Berikut daftar unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memperoleh predikat WBK pada tahun 2023:

**Tabel 3.20 Unit/Satuan Kerja yang Memperoleh Predikat  
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**


<b>No.</b>	<b>Nama Satuan Kerja</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	Unit Eselon I
2.	Ditjen Hak Asasi Manusia	Unit Eselon I
3.	Kantor Wilayah Sulawesi Utara	Unit Kantor Wilayah
4.	Kantor Wilayah Jambi	Unit Kantor Wilayah
5.	Kantor Wilayah Banten	Unit Kantor Wilayah
6.	Kantor Wilayah Jawa Tengah	Unit Kantor Wilayah
7.	Kantor Wilayah Sumatera Utara	Unit Kantor Wilayah
8.	Kantor Wilayah Sulawesi Barat	Unit Kantor Wilayah
9.	Kantor Wilayah Maluku	Unit Kantor Wilayah
10.	Lapas Kelas I Madiun	Unit Pemasyarakatan
11.	Lapas Kelas IIA Magelang	Unit Pemasyarakatan
12.	Lapas Kelas IIA Banyuasin	Unit Pemasyarakatan
13.	Lapas Kelas IIA Palopo	Unit Pemasyarakatan
14.	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	Unit Pemasyarakatan
15.	Lapas Kelas IIA Bulukumba	Unit Pemasyarakatan
16.	Lapas Kelas IIA Parepare	Unit Pemasyarakatan
17.	Lapas Kelas IIA Padang	Unit Pemasyarakatan
18.	Lapas Kelas IIB Payakumbuh	Unit Pemasyarakatan
19.	Lapas Kelas IIB Polewali	Unit Pemasyarakatan
20.	Lapas Kelas IIB Sumedang	Unit Pemasyarakatan
21.	Lapas Kelas II B Boalemo	Unit Pemasyarakatan
22.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi	Unit Pemasyarakatan
23.	Lapas Kelas IIB Slawi	Unit Pemasyarakatan
24.	Lapas Kelas IIB Sekayu	Unit Pemasyarakatan
25.	Lapas Kelas IIB Amuntai	Unit Pemasyarakatan
26.	Lapas Kelas III Rangkasbitung	Unit Pemasyarakatan
27.	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Unit Pemasyarakatan

No.	Nama Satuan Kerja	Keterangan
28.	Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda	Unit Pemasyarakatan
29.	Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto	Unit Pemasyarakatan
30.	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	Unit Pemasyarakatan
31.	Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung	Unit Pemasyarakatan
32.	Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	Unit Pemasyarakatan
33.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	Unit Pemasyarakatan
34.	Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman	Unit Pemasyarakatan
35.	LPKA Kelas II Lombok Tengah	Unit Pemasyarakatan
36.	LPKA Kelas IIB Tanjung Pati	Unit Pemasyarakatan
37.	Rutan Kelas I Depok	Unit Pemasyarakatan
38.	Rutan Kelas IIB Garut	Unit Pemasyarakatan
39.	Rutan Kelas IIB Barru	Unit Pemasyarakatan
40.	Rutan Kelas IIB Salatiga	Unit Pemasyarakatan
41.	Rutan Kelas IIB Banda Aceh	Unit Pemasyarakatan
42.	Rutan Kelas IIB Magetan	Unit Pemasyarakatan
43.	Rutan Kelas IIB Sengkang	Unit Pemasyarakatan
44.	Rutan Kelas IIB Bantaeng	Unit Pemasyarakatan
45.	Rutan Kelas IIB Tamiang Layang	Unit Pemasyarakatan
46.	Rutan Kelas IIB Ternate	Unit Pemasyarakatan
47.	Rutan Kelas IIB Pacitan	Unit Pemasyarakatan
48.	Rutan Kelas IIB Pemalang	Unit Pemasyarakatan
49.	Bapas Kelas II Mataram	Unit Pemasyarakatan
50.	Bapas Kelas II Purwokerto	Unit Pemasyarakatan
51.	Bapas Kelas II Kediri	Unit Pemasyarakatan
52.	Bapas Kelas II Bau Bau	Unit Pemasyarakatan
53.	Bapas Kelas II Pekalongan	Unit Pemasyarakatan
54.	Bapas Kelas II Klaten	Unit Pemasyarakatan
55.	Bapas Kelas II Nusakambangan	Unit Pemasyarakatan
56.	Bapas Kelas II Sampit	Unit Pemasyarakatan

No.	Nama Satuan Kerja	Keterangan
57.	Rupbasan Kelas I Jayapura	Unit Pemasyarakatan
58.	Rupbasan Kelas I Surakarta	Unit Pemasyarakatan
59.	Rupbasan Kelas II Cilacap	Unit Pemasyarakatan
60.	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	Unit Imigrasi
61.	Kanim Kelas I TPI Padang	Unit Imigrasi
62.	Kanim Kelas II TPI Sabang	Unit Imigrasi
63.	Kanim Kelas II TPI Langsa	Unit Imigrasi
64.	Kanim Kelas II TPI Nunukan	Unit Imigrasi
65.	Kanim Kelas II Non TPI Agam	Unit Imigrasi
66.	Kanim Kelas II Non TPI Ketapang	Unit Imigrasi
67.	Kanim Kelas II Non TPI Polewali Mandar	Unit Imigrasi

## E. PEMANTAUAN

1. Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK dan BPKP serta hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Berdasarkan hasil dari pemantauan, sebagian temuan dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Dari tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja, terdapat tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi dan tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi.
2. Penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil penguatan Tim Penilai Internal (TPI) terhadap kualitas pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dinilai memadai.
3. Monitoring dan evaluasi satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) masih memenuhi kriteria sebagai satuan kerja berpredikat WBBM karena masih menunjukkan adanya pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan dalam mempertahankan predikat WBBM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan



Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, persentase pemenuhan data dukung RKT-RB oleh Unit Eselon I mencapai 100%, persentase pemenuhan data dukung RKT-RB oleh Kantor Wilayah mencapai 100%, dan persentase pemenuhan data dukung RKT-RB oleh Unit Pelaksana Teknis mencapai 98,1%.
5. Monitoring penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### **F. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA**

1. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.
2. Kegiatan Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
3. Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah.
4. Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
5. Pendampingan dalam penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
6. Penyusunan Manajemen Risiko dan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.
7. Kegiatan Inspektur Wilayah Aktif Mendengar dan Memberi Solusi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
8. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.
9. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai.
10. Konsinyasi Percepatan Finalisasi Pembangunan Aplikasi E-MAWAS Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.
11. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Ketentuan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2023.
12. Rapat Kerja Pengawasan tentang Penyusunan Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

13. Pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Kegiatan Penyusunan Postur RKA-K/L Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024.
14. Revisi Permenkumham Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
15. Penyusunan Pedoman Audit Ketaatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Training auditor internal sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
17. Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF).
18. Penyusunan dan sosialisasi Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembangunan Integritas.
19. Telaahan Sejawat (*peer review*) Internal di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
20. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023.
21. Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2025.
22. Pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal melalui Pendidikan dan pelatihan, aktif belajar, FGD, dan sertifikasi kompetensi dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:
23. Bahwa sepanjang tahun 2023, tidak terdapat kunjungan konsultasi baik kunjungan secara langsung maupun melalui laman <https://konsultitjen.kemenkumham.go.id>.
24. Dalam melaksanakan audit dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern, auditor harus memahami dan menguji serta mengungkapkan dalam laporan hasil audit dan evaluasi. Informasi yang dilaporkan tersebut, sebagaimana table di bawah ini:

**Tabel 3.21 Jumlah Objek Audit/Evaluasi yang telah/belum menerapkan SPI**

Keterangan	Jumlah
<b>INSPEKTORAT WILAYAH I</b>	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	0
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
<b>INSPEKTORAT WILAYAH II</b>	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	17
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	17
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0

INSPEKTORAT WILAYAH III	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	47
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	47
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	27
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	27
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
INSPEKTORAT WILAYAH V	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	0
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
INSPEKTORAT WILAYAH VI	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	0
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0

## G. CAPAIAN LAINNYA

### 1) Capaian Program Unggulan Tahun 2023

## PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2023 (1)

### GERBANG TRANSISI

Dilaksanakan untuk membangun kesadaran, membangkitkan motivasi, memberikan inspirasi kepada seluruh satuan kerja oleh Inspektur Jenderal. Telah dilaksanakan **16 (enam belas) Kegiatan** pada satuan kerja Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Banten, Lampung, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Riau dan Bangka Belitung.

### AKTIF BELAJAR PLUS

Dilaksanakan sebagai implementasi *corporate university* mulai Januari s.d. Desember 2023 sebanyak **32 Materi, 96 JP (Jam Pelajaran)** menghadirkan narasumber kompeten dari Internal Kementerian Hukum dan HAM dan dari K/L terkait lainnya.

### IRWIL AKTIF MENDENGAR UNTUK MEMBERI SOLUSI

Kegiatan Para Inspektur Wilayah yang mengutamakan ke Satuan Kerja yang jarang dikunjungi Inspektorat Jenderal. Dengan tujuan penjaminan mutu serta memberikan konsultasi ke Satuan Kerja. Kegiatan initalah dilaksanakan sebanyak **26 (dua puluh enam) Kegiatan** oleh Seluruh Inspektur Wilayah di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM



## PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2023 (2)



### SERTIFIKASI PAKSI DAN CRMO

Sertifikasi Penyuluh **Anti Korupsi (PAKSI)** yang ditunjukkan bagi Pejabat dan Pegawai pada Kementerian Hukum dan HAM, dengan Pilot Project adalah **Pegawai Inspektoral Jenderal** yang telah dilaksanakan pada **Agustus 2023**, dan Pegawai dan Pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bulan **November 2023** bekerja sama dengan **KPK serta BPSDM Kementerian Hukum dan HAM**.

**Certified Risk Management Officer (CRMO)** adalah Sertifikasi terkait keahlian Analisis Manajemen Risiko Organisasi terintegrasi yang diperuntukan bagi jajaran Pejabat dan Pegawai Inspektoral Jenderal, telah di ikuti oleh **6 (enam)** Pegawai pada Gelombang I dan yang telah lulus sertifikasi sebanyak **3 (tiga)** orang di Bulan April 2023 dan **6 (enam)** Pegawai pada Gelombang II yang akan dilaksanakan pada 24 s.d 26 Juli 2023.

**Training of Fasilitator (ToF)** Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi (PRESTASI) dilaksanakan pada 18 s.d. 22 September 2023.

**Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR)** yang dilaksanakan pada 13 s.d. 17 November 2023.

### E-MAWAS VER. 2023

Fase Pembangunan Aplikasi EMAWAS Versi 2023 sudah mencapai **100%**. Saat ini sedang dilakukan ITSA (Information Technology Security Assesment) Oleh Tim PUSDATIN dan BSSN serta Persiapan Uji Fungsi UAT (User Acceptance Test) oleh Inspektoral Jenderal agar Aplikasi yang sudah dibangun dapat digunakan dan dipahami penggunaannya oleh User.

## 2) Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah sertifikasi internasional terkait manajemen anti suap dikeluarkan oleh TUV NORD Group yang menetapkan dan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar untuk ruang lingkup kegiatan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sertifikasi ini telah berhasil diperoleh Inspektoral Jenderal sejak Tahun 2020 dan dapat terus dipertahankan s.d. Tahun 2022 serta dilakukan re-Sertifikasi pada Tahun 2023 dengan berhasil memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Nomor 03 13 J 13000624 yang akan berlaku sampai Tahun 2026.

Berikut tahapan implementasi ISO 37001:2016 SMAP sepanjang tahun 2023:

**Tabel 3.22**

**(Tahapan kegiatan implementasi ISO 37001:2016 SMAP Tahun 2023)**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Ditetapkannya tim kerja implementasi ISO 37001:2016 SMAP melalui SK Inspektur Jenderal Nomor ITJ-29.OT.02.01 Tahun 2023	30 Mei 2023
2	Kick Off Meeting & Sosialisasi ISO 37001:2016 SMAP Tahun 2023	30 Mei 2023
3	Review dokumen GAP Analysis ISO 37001:2016 SMAP	Juni s.d September 2023
4	Bimtek Internal Audit Re-sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP	17-18 Juli 2023



5	Internal Audit Re-sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP	4-6 September 2023
6	Penyampaian laporan hasil Internal Audit kepada FKAP	15 September 2023
7	Audit Eksternal Re-sertifikasi ISO 37001:20016 SMAP	18-19 September 2023
8	Penyampaian Hasil Audit Eksternal Re-sertifikasi ISO 37001:20016 SMAP	Oktober 2023

### 3) Rekapitulasi Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bahwa pada tahun anggaran 2023 telah diterapkan kebijakan baru terkait Disiplin PNS. Inspektorat Jenderal selaku fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Bahwa pada PP Nomor 94 Tahun 2021 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN dan PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS jo PP 17 Tahun 2020 yang mengatur terkait kewajiban PNS, larangan PNS, tingkat & jenis hukuman disiplin sampai dengan ketentuan penutup. Satu hal yang menjadi sorotan adalah aturan hukuman disiplin sedang yang sebelumnya hanya bersifat administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun, akan tetapi pada peraturan baru tersebut dirubah menjadi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan s.d 12 bulan lamanya. Selain itu, salah satu poin yang membedakan dari aturan sebelumnya di PP Nomor 53 Tahun 2010 jika pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan hukuman disiplin setingkat lebih berat.

Sejalan dengan peraturan yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal melakukan Revisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2023.

Rekapitulasi data hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.23**  
**(Rekapitulasi Hukuman Disiplin Tahun 2023)**

KETERANGAN	JUMLAH
<b>Dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin</b>	
Ringan	3
Sedang	8
Berat	96
PP Nomor 11 Tahun 2017	7
Belum Ada Usulan	35
<b>Total</b>	<b>149</b>
<b>Selesai Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin</b>	
Ringan	175
Sedang	203
Berat	85
PP Nomor 11 Tahun 2017	9
<b>Total</b>	<b>472</b>
<b>Rekapitulasi Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Penyimpangan</b>	
Tidak masuk kerja	209
Penyalahgunaan Wewenang	89
Perselingkuhan	55
Pelarian Narapidana/ Lalai	133
Pemukulan Narapidana	2
Narkotika	38
Pidana Umum	15
Pungutan Liar dan Suap	59
Pengancaman	1
Senjata Api	0
Belum Diketahui	20
<b>Total</b>	<b>621</b>

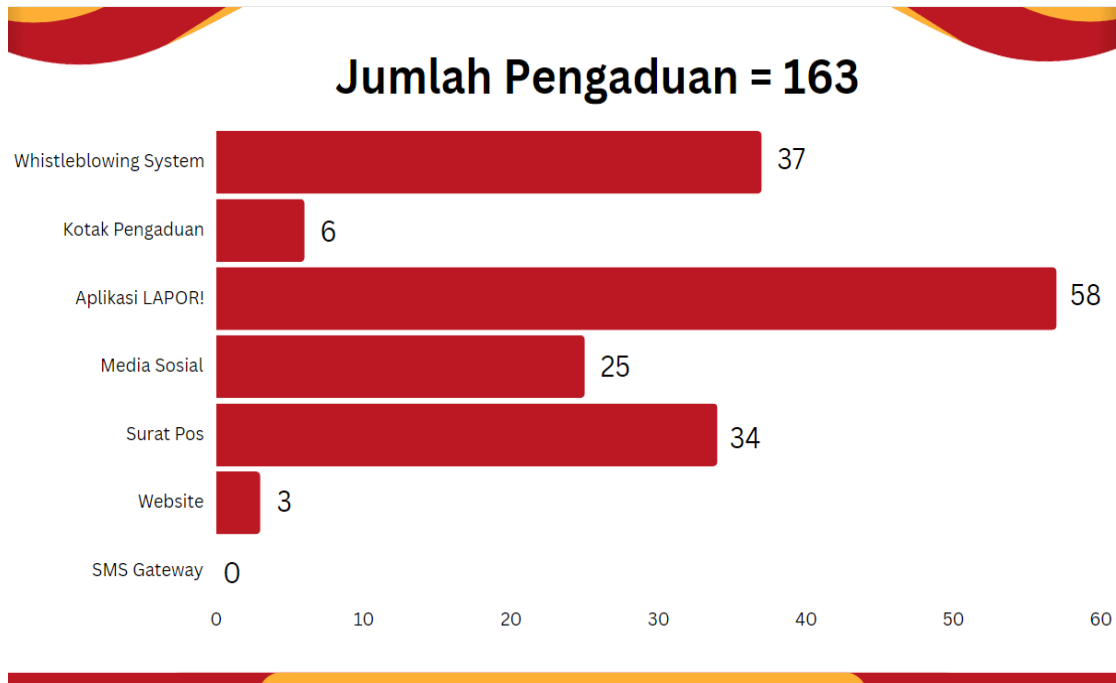
4) Dukungan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Bahwa jumlah pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diterima melalui Whistleblowing System (WBS), Kotak Pengaduan, Aplikasi

LAPOR, Media Sosial, Surat Pos, Website, dan SMS Gateway yaitu 163 pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

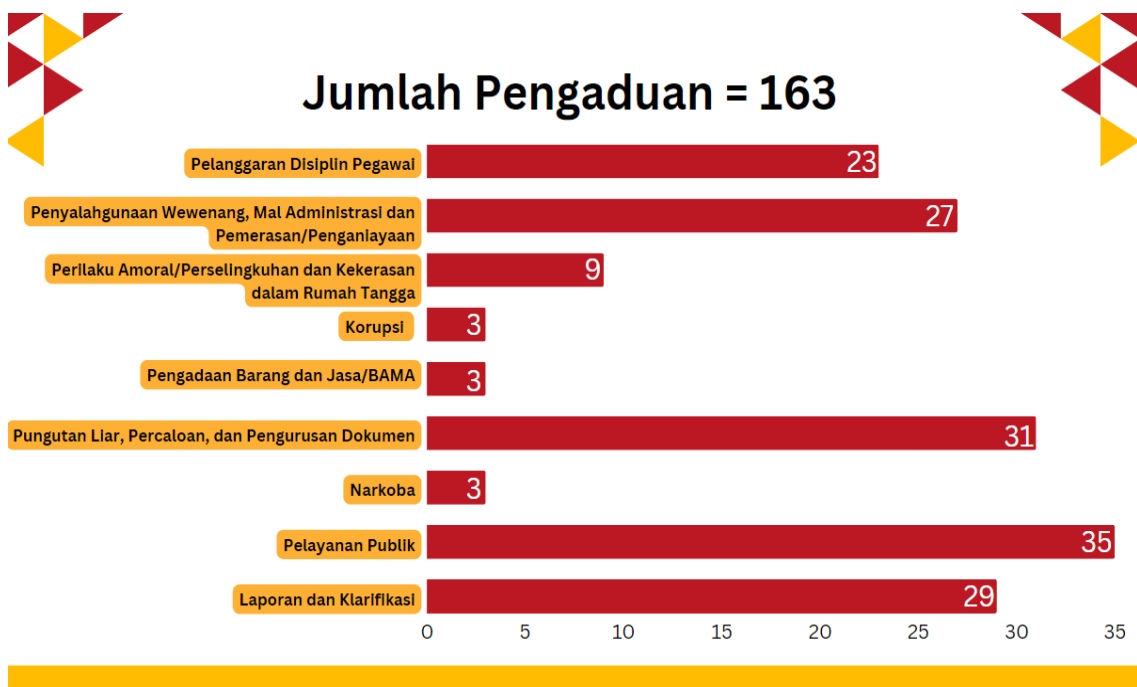
**Grafik 3.24**

**Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kanal Pengaduan**

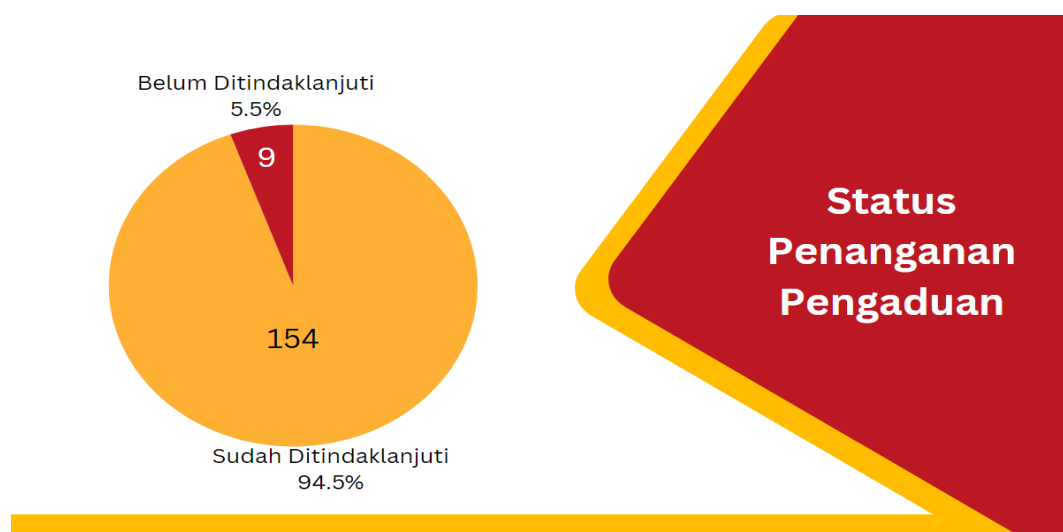


**Grafik 3.25**

**Jumlah Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan**



**Grafik 3.26**  
**Status Penanganan Pengaduan**



5) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut sampai dengan Semester I Tahun 2023 menunjukkan atas 112 LHP (Laporan Hasil Pengawasan) dengan 983 temuan senilai Rp955.900.189.210,24 (sembilan ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan 2.217 rekomendasi senilai Rp438.933.400.646,18 (empat ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), status tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan rekomendasi sebanyak sebanyak 2.066 (dua ribu enam puluh enam) rekomendasi (93,19%) senilai Rp 163.117.295.031,92 (seratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tigapuluh satu rupiah);
- b) Belum sesuai rekomendasi sebanyak 150 rekomendasi (6,76%) senilai Rp 164.205.557.550,26 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- c) Belum ditindaklanjuti sebanyak sebanyak 0 rekomendasi (0%);
- d) Satu rekomendasi (0,05%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah senilai Rp111.610.548.064,00 (seratus sebelas miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).

**HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT (PTL) SEMESTER I 2023 PEMERIKSAAN BPK  
PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Terdapat 983 Temuan, Senilai Rp.955.900.189.210,24 2.217 Rekomendasi, Senilai Rp.438.933.400.646,18		
Uraian	Rekomendasi	
	Jumlah	Senilai (Rp)
Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi	2.066	163.117.295.031,92
Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi	150	164.205.557.550,26
Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti	0	0
Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	1	111.610.548.064,00
<b>Jumlah Rekomendasi</b>	<b>2.217</b>	<b>438.933.400.646,18</b>

**Persentase Penyelesaian**

**93.19%**



Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Semester I 2023  
Terdapat 150 Tindak Lanjut yang belum sesuai rekomendasi dengan nilai Rp.164.205.557.550,26

150 Belum Sesuai Rekomendasi Senilai Rp.164.205.557.550,26	Administrasi	110 Rekomendasi
	Setoran	40 Rekomendasi Senilai Rp.164.205.557.550,26
0 Belum Ditindaklanjuti Senilai Rp.0-	Administrasi	0 Rekomendasi
	Setoran	0 Rekomendasi Senilai Rp.0-

e) Penyelesaian Tindak Lanjut

Penyelesaian Tindak Lanjut dalam 3 tahun terakhir, yaitu :

- Pemantauan Tindak Lanjut BPK Semester II tahun 2020, sebesar 83,02%;
- Pemantauan Tindak Lanjut BPK Semester I tahun 2021, sebesar 88,40%;
- Pemantauan Tindak Lanjut BPK Semester II tahun 2021, sebesar 91,53%;
- Pemantauan Tindak Lanjut BPK Semester I tahun 2022, sebesar 91,23%;
- Pemantauan Tindak Lanjut BPK Semester II tahun 2022, sebesar 91,80%;
- Pemantauan Tindak Lanjut BPK Semester I tahun 2023, sebesar 93,19%;

Selain itu, berikut disampaikan data Temuan dan Rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Tahun 2022 dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNPB Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia yang belum termasuk dalam Rekomendasi dan Temuan yang ditindaklanjuti pada periode Pemantauan Tindak Lanjut Semester I 2023 sebagai berikut:



Sebagai upaya percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka terpenuhinya solusi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Kegiatan Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan pada tanggal 14-17 November 2023 diikuti oleh perwakilan dari unit eselon I dan kantor wilayah.

Sebagai upaya percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kementerian Hukum dan HAM dalam



rangka terpenuhinya solusi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Kegiatan Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan pada tanggal 14-17 November 2023 diikuti oleh perwakilan dari Unit Eselon I dan Kantor Wilayah.

Selama kegiatan konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, pemenuhan data dukung tindak lanjut entitas yang akan dipergunakan sebagai bahan reviu BPK pada PTL Semester II Tahun 2023 mencapai angka 98.15%, diharapkan data dukung tersebut telah sesuai dengan dengan rekomendasi dari tim pemeriksa BPK.

6) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, jumlah temuan sampai dengan Desember 2023 yaitu sebanyak 1792 temuan dengan nilai sebesar Rp46.965.934.424,59 (empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang sudah tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 1682 temuan dengan nilai sebesar Rp46.174.476.359,59 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang belum tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 109 temuan dengan nilai sebesar Rp791.458.065,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah).

**Tabel 3.27**

**Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP s.d. Desember 2023**

JENIS	SUDAH TUNTAS (Rp)	BELUM TUNTAS (Rp)	TOTAL(Rp)
Temuan	1682	110	1.792
Nilai	46.174.476.359,59	791.458.065,00	46.965.934.424,59

**Gambar 3.28**  
**(Rekapitulasi Tuntas Temuan dan Tindakanjuit Pengawasan BPKP)**

REKAPITULASI DATA TUNTAS TEMUAN DAN TINDAK LANJUT						
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN						
Periode Pelaporan sd.18/03/2020						
Tindakanjuit sd. 18/03/2020						
NO.	UNIT PENGAWASAN	#Kej	TEMUAN Nilai Rp.	#Kej	TINDAKLANJUT Nilai Rp.	SALDO Nilai Rp.
1.	DITWAS PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI	0	-	0	-	-
2.	DITWAS PENEGAKAN HUKUM & SEKRETA RIAT LEMBAGA TERTINGGI & TINGGI NEG	83	430,071,598.00	83	430,071,598.00	-
3.	DIT INVESTIGASI INSTANSI PEMERINTAH	11	32,193,209,725.00	11	32,193,209,725.00	-
4.	PERW. BPKP PROVINSI ACEH	69	420,274,292.81	69	420,274,292.81	-
5.	PERW. BPKP PROVINSI RIAU KEPULAUAN	13	2,156,000.00	13	2,156,000.00	-
6.	PERW. BPKP PROVINSI BANGKA-BELITUNG	16	6,835,686.00	16	6,835,686.00	-
7.	PERW. BPKP PROVINSI JAWA TENGAH	75	2,592,669,886.62	75	2,592,669,886.62	-
8.	PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	36	490,076,255.89	36	490,076,255.89	-
9.	PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	52	80,914,218.98	52	80,914,218.98	-
10.	PERW. BPKP PROVINSI PAPUA BARAT	17	39,083,700.25	17	39,083,700.25	-
11.	PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT	1	-	1	-	-
Tuntas			Jml Temuan	Sudah Tuntas	94%	
Medium Priority				Belum Tuntas	6%	
High Priority			Nilai Temuan	Sudah Tuntas	98%	
				Belum Tuntas	2%	

7) Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Data Ombudsman RI sampai dengan Desember Tahun 2020 jumlah rekapitulasi data pengaduan belum ditindaklanjuti dari Ombudsman RI yang ditujukan Kementerian Hukum dan HAM, terdapat 48 aduan dengan rincian sebagai berikut:

DATA TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI OMBUDSMAN RI									
No.	Tanggal Terima surat	Pengirim	No Surat	Tanggal Surat	Nama / Instansi terlapor	Kewenangan	Permasalahan	Klasifikasi	Status Lap. di Ombudsman
1	12/03/2020	Ombudsman	0016/LM/VI/2018/SMG	19-Feb-18	KANWILJAWA TENGAH	Inspektorat Wilayah IV	Dugaan penundaan berlarut terkait penanganan laporan Pelapor mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan CV. Menara Kudus oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.	Layanan Kekayaan Intelektual	Proses
2	12/03/2020	Ombudsman	0163/LM/XI/2018/BDG	23-Nov-18	KANWILJAWA BARAT	Inspektorat Wilayah II	Keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-66.KP.07.03 Tahun 2018 tentang hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama	Lain-lain	Proses
3	12/03/2020	Ombudsman	0064/LM/VI/2020/JKT	18-Feb-20	DITJEN KI	Inspektorat Wilayah V	Dugaan penyimpangan prosedur dalam pemrosesan/pemeriksaan atas permohonan pendaftaran merek ZEEDO + Lukisan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Layanan Kekayaan Intelektual	Proses
4	12/03/2020	Ombudsman	0059/IN/VI/2020/JKR	18-Feb-20	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	Inspektorat Wilayah II	Dugaan penyalahgunaan wewenang terkait dengan warga binaan pemasyarakatan perempuan yang kedatangan keluar Lapas	Layanan Pemasyarakatan	Proses
5	12/03/2020	Ombudsman	0002/LM/VI/2020/KDI	10-Jan-20	LAPAS PEREMPUAN KELAS III KENDARI	Inspektorat Wilayah II	Pelapor keberatan terkait narapidana pada LPP Kelas III Kendari yang bebas keluar masuk lapas	Layanan Pemasyarakatan	Proses
6	12/03/2020	Ombudsman	0108/LM/VI/2019/KDI	25-Sep-19	LAPAS KELAS IIA KENDARI	Inspektorat Wilayah II	Pelapor keberatan terkait warga Binaan Lapas Kelas II A Kendari yang dapat bebas keluar dari dalam Lapas tanpa pengawasan dari pihak Lapas dan dapat melakukan perbuatan Pidana	Layanan Pemasyarakatan	Proses
7	12/03/2020	Ombudsman	0082/IN/VII/2019/KDI	06-Aug-19	LAPAS KELAS IIA KENDARI	Inspektorat Wilayah II	Dugaan Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas II A Kendari dalam memberikan izin khusus terhadap Narapidana an. Asrum dan an. Adnatma Dwi Putra	Layanan Pemasyarakatan	Proses
8	21/08/2023	Ombudsman	1/1883/LM.11-Ks/008.2023/G/VIII/2023	11 Agustus 2022	DITJEN IMIGRASI	Inspektorat Wilayah VI	Ekspose Status Kepegawaian atas Nama Alm. Muhammad Hidayat berkaitan dengan pemenuhan Hak Pensiun Yfs.	Layanan Kepegawaian	Tuntas

**Gambar 3.29**



(Data Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Melalui Ombudsman RI)

Tahun	Jumlah Aduan	Status
2014	4 aduan	Belum di TL
2016	1 aduan	Belum di TL
2017	1 aduan	Belum di TL
2018	7 aduan	Belum di TL
2019	17 aduan	Belum di TL
2020	17 aduan	Belum di TL
2023	1 Aduan	Tuntas

**Tabel 3.30**  
**(Jumlah Aduan Melalui Ombudsman RI)**

- 8) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Jenderal Tahun 2023 Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM s.d. Desember 2023, jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Jumlah temuan sebanyak 7573 temuan dengan nilai sebesar Rp353.821.639.179 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 7060 temuan dengan nilai sebesar Rp145.866.174.315 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).
  - Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 513 temuan dengan nilai sebesar Rp207.955.464.865 (dua ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

**Tabel 3.31**  
**Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP**  
**Inspektorat Jenderal Tahun 2023**

Temuan		Sudah Tindak Lanjut		Belum Tindak Lanjut	
Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal
7573	Rp353.821.639.179	7060	Rp145.866.174.315	513	Rp207.955.464.865

- 9) Dukungan Pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)  
Presentase tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebesar 100% dengan jumlah

wajib lapor sebanyak 180 penyelenggara negara. Sedangkan presentase tingkat kepatuhan pelaporan LHKASN dan pengunggaran BPE SPT Pajak Tahunan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.32**  
**(Pelaporan LHKASN dan BPE SPT 2023)**

	Jumlah Pelapor	Yang Melapor	Persentase
LHKASN	59.135	59.133	99,997%
BPE SPT	64.011	63.841	99,73%

- 10) Penyusunan Peraturan perundangan yang diinisiasi Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-13.OT.03.02 Tahun 2023 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.18.OT.02.01 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

11) Survei Internalisasi Tata Nilai

Dari hasil pelaksanaan survei online internalisasi Tata Nilai BerAKHLAK yang telah dilaksanakan diperoleh nilai rata-rata 205,44 dari total 250, apabila dikonversi menggunakan skala 100 dan skala 5 sebagaimana table dibawah diperoleh nilai 82,176 dan skala 5 dipeoleh nilai **4.1088** dengan indeks **Sangat Baik**.

**Tabel 3.33 Indeks/Score Penilaian**

No	Rentang Nilai	Konversi Skala 5	Indeks/Nilai
1	0-20	0-1	Sangat Buruk
2	21-40	1.1-2	Buruk
3	41-60	2.1-3	Cukup
4	61-80	3.1-4	Baik
5	81-100	4.1-5	Sangat Baik

- 12) Pengembangan aplikasi E-MAWAS Versi 2023 bersama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Progres E-MAWAS telah mencapai fase final dari pengembangan aplikasi E-MAWAs versi 2023

yang terdiri dari : Modul Dashboard, Modul Rencana Penugasan, Modul Audit dan Modul Audit Tujuan Tertentu;

- 13) Pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengawasan Internal dalam Internalisasi *Core Value* Ber-AKHLAK untuk menjaga Keagungan Kementerian Hukum dan HAM sekaligus memperingati Hari Jadi Inspektorat Jenderal ke-57 Tahun 2023 dengan mengusung tema “Akselerasi Digital Wujudkan Pengawasan Optimal” pada tanggal 8 November 2023;
- 14) Bahwa pegawai Inspektorat Jenderal sudah memenuhi standar kompetensi melalui pelaksanaan Ukom. Selain itu, telah dilaksanakan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan untuk pegawai, sebanyak 40 jenis Diklat, 34 materi aktif belajar (96 JP), 6 kali/materi workshop, dengan rincian :

Jenis Pengembangan Kompetensi	Nama Pengembangan Kompetensi	Jumlah peserta (pegawai)
DIKLAT	Pelatihan Public Speaking, Master Of Ceremonies (MC) dan Conductor TA 2023	20 Orang
	Pelatihan dan Sertifikasi Information Technology Auditor (IT Auditor) Batch 3 Tahun 2023	2 Orang
	Massive Open Online Courses (MOOC) Reformasi Birokrasi Gelombang I	76 Orang
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Metode Blended Learning Angkatan CCII	1 Orang
	Pelatihan dan Sertifikasi Certification of Government Accounting Expert (CGAE) Level 2 Batch 2	2 Orang
	Pelatihan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship Tahun 2023 (GTA DTS 2023), program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tema Pelatihan Junior Network Administrator Online Batch 1	2 Orang
	Pelatihan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship Tahun 2023 (GTA DTS 2023), program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tema Pelatihan Sistem Manajemen Layanan TI	1 Orang
	Pelatihan Penyelenggaraan Sistem	2 Orang

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	
Pelatihan Certification of Government Accounting Expert (CGAE) Level 2 Batch 3	2 Orang
Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer Tahun Anggaran 2023	30 Orang
Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli Tahun 2023	1 Orang
Pelatihan <i>Certified Risk Management Officer</i> (CRMO)	6 Orang
Pelatihan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship	1 Orang
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1	2 Orang
Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Angkatan I	1 Orang
Pelatihan dan sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) Pusat Batch 3	4 Orang
Pelatihan dan Sertifikasi CDSP Batch	1 Orang
Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda	15 Orang
Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Angkatan II	1 Orang
Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda dengan metode Tatap Muka	1 Orang
Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) Pusat Batch 4	2 Orang
Pelatihan Certified Risk Management Officer (CRMO) Gelombang II	6 Orang
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII	3 Orang
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VIII	3 Orang
Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Expert (CGAE) Pusat Level 1 Batch 3	2 Orang
Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Angkatan III Tahun 2023	1 Orang
Pelatihan dan Sertifikasi Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)	1 Orang

	Pelatihan Master of Ceremony (MC)	1 Orang
	Pelatihan Evaluasi atas Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	25 Orang
	Pelatihan Fungsional Auditor Terampil	1 Orang
	Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Angkatan IV Tahun 2023	1 Orang
	Pelatihan dan Sertifikasi Certification of Government Accounting Expert (CGAE) Level 1 Batch 5	1 Orang
	Training of Fasilitator (ToF) Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi (PRESTASI)	1 Orang
	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan II Tahun 2023	2 Orang
	Pelatihan dan Sertifikasi Certification of Government Accounting Expert (CGAE) Level 1 Batch 4	1 Orang
	Diklat Sertifikasi Certified Government Risk Executive (CGRE) Batch I	2 Orang
	Diklat Diklat PELOPOR (Pelatihan Calon Penyuluh AntiKorupsi) metode <i>blended</i> .	3 Orang
	Diklat CRMO (Certified Risk Management Officer) Gel. III.	6 Orang
	Pelatihan Jarak Jauh Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Bagi Kementerian/ Lembaga.	1 Orang
	Short Course Digital Forensic dan Data Analytic diLingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	20 Orang
AKTIF BELAJAR	Soft launching Aplikasi SERAYA, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara ITJEN Kemenkumham dengan LPSK, dan Pembukaan Kegiatan Aktif Belajar Plus	486 Orang
	Implementasi Manajemen Resiko Fokus pada Pemantauan Penanganan Resiko dan	165 Orang

Penyusunan laporan Manajemen Resiko	
Internalisasi Core Values BerAkhlak dan 10 pesan Inspektur Jenderal	154 Orang
Healty Safety and Environment (HSE) Training (Pelatihan kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja)	192 Orang
Audit Khusus atas kasustertentu disertai dengan penyusunan laporan dari menyusun konsep permasalahan, data, analisis, pendapat, simpulan dan saran	183 Orang
Mekanisme dan Implementasi SPBE pada Instansi Pemerintah	165 Orang
Meningkatkan Integritas ASN dalam membangun budaya Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi	139 Orang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	138 Orang
Pengadaan Barang dan Jasa secara swakelola	88 Orang
Knowing Toxic Workplace and Toxic Personalities (Mengenali lingkungan kerja yang tidak sehat)	160 Orang
Unit kepatuhan Internal	172 Orang
Pengelolaan Penanganan Pengaduan	150 Orang
Pendidikan Karakter dalam Rangka Mewujudkan APIP Kemenkumham BerAKHLAK dan PASTI PINTAR	160 Orang
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor	132 Orang
Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	116 Orang
Manajemen Konflik	144 Orang

	Konsekuensi/Dampak JFA Terkena Hukuman Disiplin	82 Orang
	Pengelolaan Arsip Dinamis	116 Orang
	Penerapan Benturan Kepentingan	125 Orang
	Audit Teknologi Informasi Komunikasi	104 Orang
	Bimtek pengadaan elektronik, e-purchasing, e-catalog dan belanja pengadaan	110 Orang
	Sosialisasi Manajemen Resiko (MR)	139 Orang
	Publik Speaking (Sharing motivasi dan Komunikasi)	140 Orang
	Pengawasan Progeam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	113 Orang
	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ)	58 Orang
	Personal Financial, Budgeting and Financial Planning for ASN (Perencanaan Keuangan bagi ASN)	199 Orang
	Pengelolaan BMN terkait pemanfaatan, penghapusan, dan penetapan status penggunaan	178 Orang
	Teknik penyusunan policy brief, policy memo, dan policy paper	149 Orang
	Pengaktifan Kembali Status PNS yang diberhentikan sementara	163 Orang
	Audit Tata Kelola Makro	157 Orang
	Teknik Fraud Investigation (Investigator Indonesia)	125 Orang
	Peran Perempuan dalam gerakan Anti Korupsi	120 Orang
	Membangun Keluarga Integritas	120 Orang
	Peran ASN dalam menghadapi media sosial di tahun politik	
PKS	Nihil	-
Workshop	Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk	131 Orang

	Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI	
	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	186 Orang
	Reviu Laporan Keuangan Kemenkumham Semester II TA 2022	36 Orang
	Penyampaian Mekanisme Pelaksanaan PenilaianMandiri Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Eselon I oleh APIP Melalui Aplikasi E-Kibedan Aplikasi E-Performance	148 Orang
	Manajemen Risiko dengan substansi “Meningkatkan Peran APIP Dalam Melakukan Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko Satuan Kerja diLingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023”	180 Orang
	Teknik Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	252 Orang
FGD	FGD Akselerasi Pengembangan Karir Di Inspektorat Jenderal	35 Orang
Sertifikasi Gelar Kompeten	Sertifikasi Analis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi Certified Risk Management Officer (CRMO)	<b>10</b>
	Pelatihan dan Sertifikasi Certification of Government Accounting Expert (CGAE) Level 1 Batch 4	<b>3</b>
	Pelatihan dan Sertifikasi Certification of GovernmentAccounting Expert (CGAE) Level 1 Batch 5	<b>1</b>
	Sertifikasi <i>Qualified Risk Management Analysst</i> (QRMA)	<b>1</b>
	Sertifikasi Pelatihan <i>Trainer Of Facilitator</i> Refleksi dan Aktualisasi Integritas (TOF PRESTASI) oleh KPK	<b>1</b>



	Sertifikasi <i>Certified Government Risk Executive</i> (CGRE)	1
	Pelatihan dan sertifikasi <i>certified government accounting Associate</i> (CGAA)	4

15) Realisasi Kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
<b>Bagian Program dan Pelaporan</b>			
1.	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Survei Pemahaman Pegawai atas Kinerja Inspektorat Jenderal	2 Maret 2023	Zoom
2.	Melaksanakan Pembahasan BA Evaluasi SAKIP	3 Maret 2023	Bekasi
3.	Menghadiri Kegiatan Panel SAKIP	13-17 Maret 2023	Karawang
4.	Menghadiri Penyusunan SE Pelaksanaan Keuangan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	15-17 Maret 2023	Bekasi
5.	Rapat Persiapan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) 2023	20-21 Maret 2023	Luring (Ruang Rapat Inspektur Jenderal) dan Daring (Virtual Zoom Meeting)
6.	Melaksanakan Kegiatan Survei Persiapan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) 2023	24 Maret 2023	The Alana Hotel & Conference Center, Bogor, Jawa Barat
7.	Melaksanakan Kegiatan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Terkait Penyusunan Pedoman Audit	27-31 Maret 2023	The Alana Hotel & Conference Center, Bogor, Jawa Barat
8.	Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2023	Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ITJ.1-UM.01.01-990 Tanggal 3 April 2023	Ruang PPL
9.	Pembahasan Rancangan Awal Informasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024	Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-KP.04.01-679 Tanggal 6 April 2023	BPSDM, Depok, Jawa Barat
10.	Penyusunan Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal TA. 2024 dan pemutakhiran data Renja KRISNA	Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK-PR.01.04-20 hal Penyampaian Pagu Indikatif TA.202 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Ruang PPL
11.	Rapat Penyusunan Revisi Permenkumham no 28 tahun 2019	Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.1-UM.01.01-	Ruang Rapat Sekretaris



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
		1007 Tanggal 10 April 2023	Inspektorat Jenderal
12.	Penyusunan SOTK Kementerian Hukum dan HAM	Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-KP.04.01-664 Tanggal 30 Maret 2023	Hotel Le Meridien Jakarta
13.	Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Kementerian Hukum dan HAM	Surat Undangan Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-UM.01.01-256 Tanggal 4 April 2023	Ruang Rapat 551 Ismail Saleh Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal
14.	Penyusunan Pedoman AUDIT	Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-KP.04.01-553 Tanggal 20 Maret 2023	The Alana Hotel & Conference Center Sentul
15.	Penyusunan Perubahan Matrik Road Map RB 2020 – 2024 Kemenkumham	Surat Undangan Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-UM.01.01-311 Tanggal 18 April 2023	Ruang Rapat 551 Ismail Saleh Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal
16.	Pengisian aplikasi monitoring dan evaluasi serta pengisian capaian output		
17.	Menyusun konsep pembahasan penentuan sampling SPI KPK		
18.	Pelaksanaan rapat pimpinan Triwulan I		
19.	Pelaksanaan penilaian mandiri SPIP terintegrasi		
20.	Rapat Postur Anggaran Inspektorat Jenderal TA.2024	Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.1-UM.01.01-1287 tanggal 4 Mei 2023 hal Rapat Penyusunan Postur Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024	Auditorium Inspektorat Jenderal Lt.16
21.	Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor ITJ.1-KP.04.01-866 tanggal 10 Mei 2023	BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Jawa Barat
22.	Penyusunan Postur RKA-K/L Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024	Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor ITJ.1-KP.04.01-928 tanggal 17 Mei 2023	BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Jawa Barat
23.	Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) dalam Rangka Penyusunan Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024	Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.01.04-411 tanggal 15 Mei 2023 hal Undangan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) dalam Rangka	BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Jawa Barat



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
		Penyusunan Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024	
24.	Rapat Pembahasan Kesembilan revisi Permen 28 Tahun 2019		
25.	Rapat Pembahasan Kesepuluh revisi Permen 28 Tahun 2019		
26.	SPI-KPK	Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor ITJ.1-KP.04.01-803 tanggal 5 Mei 2023 hal Pelaksanaan Penguatan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023	1. Sulawesi Tengah 2. Lampung 3. Jawa Timur
27.	Evaluasi Kinerja (Manajemen Risiko, Perjanjian Kinerja, dan Program Unggulan) di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	Surat Perintah Nomor: ITJ.1-KP.04.01-926	BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Jawa Barat
28.	Pencetakan Perjanjian Kinerja TA.2023 Pemutakhiran Versi I		
29.	Penyampaian Perbaikan Usulan Buka Blokir Automatic Adjustment Inspektorat Jenderal TA. 2023 ke Biro Perencanaan	ITJ.1-PR.01.04-18 Tanggal 15 Juni 2023	
30.	Permohonan Nama Pejabat/Pegawai untuk Tim Perubahan Substansi Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024	Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.1-UM.01.01-1776 Tanggal 26 Juni 2023	
31.	Percepatan Pemenuhan Data Dukung Pelaksanaan New Reformasi Birokrasi Periode B03 dan B06 Di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Tanggal 16 Juni 2023	
32.	Konsiyering Revisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019	Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor : ITJ-KP.04.01-1144 Tanggal 16 Juni 2023	Harris Vertu Hotel Harmoni Jakarta
33.	SPI-KPK	Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor : ITJ.1-KP.04.01-803 tanggal 5 Mei 2023 dan	1. Kalimantan Barat 2. Yogyakarta 3. Banten 4. Kalimantan Selatan



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
		Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor ITJ.1-KP.04.01-1015 tanggal 31 Mei 2023 hal Pelaksanaan Penguatan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023	5. Jawa Barat
34.	Evaluasi B06	12 sd 14 Juli 2023	Wisma Pengayoman
35.	Rapat Pelaksaaan Persiapan Penyusunan Pedoman Audit Ketaatan.	11 Juli 2023	Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal
36.	Persiapan penyusunan pagu anggaran Inspektorat Jenderal TA. 2024 (Itwil dan Bagian).		Ruangan Bagian PPL
37.	Penyusunan SK Tim Penyusun Perubahan Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024.		Ruangan Bagian PPL
38.	Penginputan penyesuaian Pagu Indikatif ke Aplikasi SAKTI (untuk persiapan Pagu Anggaran TA. 2024).		Ruangan Bagian PPL
39.	Penyusunan Pedoman Audit Ketaatan.	Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor : ITJ-KP.04.01-1315 Tanggal 14 Juli 2023	Hotel Gran Melia Jakarta
40.	Pemenuhan data PRA untuk data dukung Telaahan Sejawat.		Ruangan Bagian PPL
41.	Pemenuhan data dukung Pagu Anggaran TA. 2024.		Ruangan Bagian PPL
42.	Input perbaikan KPJM pada aplikasi SAKTI.		Ruangan Bagian PPL
43.	Membuat konsep Bab 4 Perubahan Renstra Itjen terkait Kerangka Pendanaan.		Ruangan Bagian PPL
44.	Pemenuhan atas permintaan data (data anggaran Itjen) untuk Biro Humas Sekretariat Jenderal terkait Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.		Ruangan Bagian PPL
45.	Pemenuhan data dukung SAKIP Tahun 2023.	Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.04.05-717 tanggal 4 September 2023 hal Data Dukung SAKIP Unit kerja Eselon I Tahun 2023	Ruangan Bagian PPL



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
46.	Kompilasi dan cek RAB dan KAK dari masing-masing Bagian/Kelompok Substansi dan Inspektorat Wilayah untuk persiapan Pagu Alokasi Anggaran TA. 2024.		Ruangan Bagian PPL
47.	Rapat Pembahasan RKA-K/L Unit Eselon I di Biro Perencanaan.	Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.01.04-787 tanggal 6 September 2023 hal Undangan Pembahasan RKA-K/L Satuan Kerja Unit Eselon I Kmenterian Hukum dan HAM TA. 2024	Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
48.	Rapat Perjanjian Kinerja Perubahan ke-2 Tahun 2023.		Ruang Rapat Inspektur Jenderal
49.	Penelaahan Pagu Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal TA. 2024.		Aplikasi SAKTI
50.	Perbaikan Pagu Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal TA. 2024 berdasarkan Catatan Hasil Reviu (CHR) APIP.		Aplikasi SAKTI
51.	Rencana Aksi Renstra Kemenkumham untuk Tahun 2024.	ITJ.1-KP.04.01-1876	Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta
52.	Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.	ITJ.1-KP.04.01-1913	Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta
53.	Rapat Penyusunan PKPT dan PKAU Inspektorat Jenderal Tahun 2024	November 2023	Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal
54.	Rapat Penyusunan PK, Disbursement Plan, Procurement Plan, dan Kalender Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024	November 2023	Ruang Rapat Inspektur Jenderal
55.	Rapat Sosialisasi Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024	November 2023	Ruang Rapat Inspektur Jenderal
56.	Rapat Penyusunan Kebijakan Pengawasan, Perjanjian Kinerja dan Kordinator pengawasan Tahun 2024	November 2023	Ruang Rapat Inspektur Jenderal
57.	Rapat Penetapan Koordinator Pegawai Tahun 2024 dan Prioritas Nasional untuk tema pengawasan tahun 2024	November 2023	Zoom Meeting
58.	Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan, dan Kalender	Desember 2023	Ruang Bagian PPL



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
	Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024		
59.	Finalisasi Konsep keputusan Menkumham tentang kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Tahun 2024	Desember 2023	Ruang Bagian PPL
60.	Penyusunan PKPT dan PKAU Inspektorat Jenderal Tahun 2024	Desember 2023	Ruang Bagian PPL
61.	Penyusunan Usulan Kebutuhan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025	Desember 2023	Ruang Bagian PPL
<b>Bagian Umum</b>			
1.	Pendampingan pimpinan pada kegiatan pembukaan Temu Bisnis Tahap VI		Laporan Rutin Perkantoran
2.	Gerbang transisi Kanwil Kalimantan Barat dan Jambi		
3.	Perbaikan kendaraan dinas		
4.	Pembayaran tagihan bulanan		
5.	Belanja keperluan kantor		
6.	Penataan dan penertiban arsip Tangerang		
7.	Cetak ornament HDKD dan HUT RI		
8.	Pengajuan penghapusan aset tak berwujud		
9.	Pendampingan Pimpinan pada Kegiatan AALCO		
10.	Pendampingan Pimpinan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Atase Imigrasi Den Haag, Belanda		
11.	Pengajuan penghapusan kendaraan dinas oleh KPKNL		
12.	Kegiatan penelitian RKBMN		
13.	Pendampingan Pimpinan pada Kegiatan Monitoring Kualitas Pelayanan Publik dan Administrasi Keuangan pada Teknis Imigrasi KJRI Jeddah		
14.	Pendampingan Pimpinan pada Penyusunan renstra 2020-2024		
15.	Pendampingan pimpinan pada raker dengan Komisi III DPR		
16.	Pendampingan Pimpinan pada Kegiatan Monitoring Kualitas Pelayanan Publik dan Administasi Keuangan Tahun 2023 pada Teknis Imigrasi KJRI Sydney		
17.	Pendampingan Pimpinan pada Kegiatan Rapat Pimpinan Inspektorat Jenderal di Ruang Inspektur Jenderal		
18.	Pendampingan pimpinan pada Kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham di Hotel Borobudur Jakarta		
19.	Pendampingan Pimpinan pada Kegiatan Perayaan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat		
20.	Pelaksanaan Lelang kendaraan dinas oleh KPKNL		
21.	Pengajuan penghapusan ATB		
22.	Perawatan rumah dinas		
<b>Kelompok Substansi Keuangan</b>			
1.	Mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Tingkat Satuan Kerja Pusat.	ITJ.1.KP.04.01-68 Tanggal 10 Januari 2023	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
2.	Mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Tingkat Wilayah.	ITJ.1.KP.04.01-142 Tanggal 24 Januari 2023	Hotel Santika Premiere ICE BSD City
3.	Mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Tingkat Unit Eselon I.	ITJ.1.KP.04.01-218 s.d. 219 Tanggal 1 Februari 2023	Hotel Grand Mercure Kemayoran
4.	Mengikuti Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semester II Tahun Anggaran 2022.	ITJ.1.KP.04.01-336 Tanggal 14 Februari 2023	Hotel Java Palace Cikarang
5.	Mengikuti Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyerahan Piagam Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2022 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	ITJ.1.KP.04.01-356 Tanggal 16/02/2023	Hotel Horison Ultima Bhuvana, Ciawi Bogor
6.	Melaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Ketentuan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2023.	ITJ.1.KP.04.01-523 Tanggal 10/03/2023	Hotel Horison Ultima Bekasi
7.	Rapat Pembahasan Pengisian Data Capaian Rincian Output TA 2023.	ITJ.1-UM.01.01-1185 Tanggal 14/04/2023	Ruang Rapat Ses Itjen
8.	Mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 Tingkat Satker Pusat.	ITJ.1-UM.01.01-1139 Tanggal 15/06/2023	Wisma Pengayoman Kemenkumham, Bogor
9.	Mengikuti Kegiatan Pembukaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah.	ITJ.1-KP.04.01-1257 Tanggal 06/07/2023	éL Hotel Bandung
10.	Mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Tingkat Unit Eselon I.	ITJ.1-KP.04.01-1289 Tanggal 12/07/2023	The Ritz Carlton, Jakarta
11.	Mengikuti Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)	ITJ.1-KP.04.01-1308 Tanggal 13/07/2023	Amaroossa Grande, Bekasi



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semester II Tahun Anggaran 2022.		
12.	Rapat Koordinasi Data Target/Proyeksi Output Inspektorat Jenderal.	ITJ.1-PW.02.04-311 Tanggal 26/07/2023	Ruang Rapat Ses Itjen dan secara zoom
13.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2023.	ITJ.1-UM.01.01-2352 Tanggal 12/09/2023	Ruang Rapat Ses Itjen dan secara zoom
14.	Rapat Langkah-Langkah Pelaksanaan Anggaran pada Akhir TA 2023.	ITJ.1-PW.02.04-512 Tanggal 30/10/2023	Ruang Rapat Ses Itjen
15.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV TA 2023.	ITJ.1-UM.01.01-3107 Tanggal 15/11/2023	Ruang Rapat Ses Itjen
16.	Sosialisasi Pelayanan Administrasi Keuangan Berbasis Digital.	ITJ.1-PW.02.04-583 Tanggal 20/11/2023	Ruang Rapat Inspektur Jenderal
17.	Rapat Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2023.	ITJ.1-PW.02.04-590 Tanggal 23/11/2023	Ruang Rapat Kelompok Substansi Keuangan
18.	Rapat Evaluasi Penggunaan Aplikasi Pelayanan Administrasi Keuangan Berbasis Digital	ITJ.1-UM.01.01-3324 Tanggal 4/12/2023	Melalui zoom
19.	Rapat Rekonsiliasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas periode Juli-Desember TA 2023 dan	ITJ.1-KU.02.01-02 Tanggal 19/12/2023	Ruang Rapat Kelompok Substansi Keuangan
20.	Rapat Evaluasi Perjalanan Dinas TA 2023	ITJ.1-UM.01.01-3389 Tanggal 27/12/2023	Ruang Rapat Kelompok Substansi Keuangan
<b>Kelompok Substansi Kepegawaian</b>			
1.	Kegiatan Internalisasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Semester II Periode 01 Juli S.D. 31 Desember 2022 Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	10 s.d 13 Januari 2023	Grande Valore Hotel, Cikarang
2.	Soft Launching Aplikasi SERAYA	16 Januari 2023	Offline dan Online melalui Zoom Meeting
3.	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Januari 2023	16 s.d 18 Januari 2023	Offline dan Online melalui Zoom Meeting
4.	UAT Aplikasi SERAYA	19 Januari 2023	Online melalui Zoom Meeting, Youtube





NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
5.	Workshop Pelaporan Kekayaan Harta Kekayaan ASN	24 Januari 2023	Online melalui Zoom Meeting, Youtube
6.	Rapat pembahasan Rencana Pelaksanaan Diklat PAKSI 2023	01 Februari 2023	Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal
7.	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Februari 2023	06 s.d 08 Februari 2023	Auditorium Inspektorat Jenderal dan Online melalui Zoom Meeting
8.	Kegiatan Penyusunan Dan Reviu LKjIP di lingkungan Inspektorat Jenderal	09 Februari 2023	Auditorium Inspektorat Jenderal dan Online melalui Zoom Meeting
9.	Rapat Koordinasi dg BPSDM terkait Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Itjen	10 Februari 2023	BPSDM
10.	Rapat Training of Trainer (ToT)	24 Februari 2023	Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal
11.	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Persamaan Persepsi Core Value BerAkhlik di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	27 Februari 2023	Auditorium Inspektorat Jenderal dan Online melalui Zoom Meeting
12.	Rapat Benturan Kepentingan	20 Maret 2023	Zoom Meeting
13.	Pendampingan uji Potensi bagi pegawai di lingkungan Itjen	08 s.d 10 Maret 2023	Zoom Meeting
14.	Rapat Koordinasi Persiapan Penguatan Pelaporan Harta Kekayaan ASN, Penginternalisasian Budaya Anti Korupsi, Serta Pengendalian Gratifikasi dan Pungutan Liar	13 Maret 2023	Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal
15.	Internalisasi dan Pembinaan Integritas dan Rohani Pegawai Inspektorat Jenderal "Menjadi Pegawai ITJEN Berakhlik"	24 Maret 2023	Auditorium Inspektorat Jenderal dan Zoom Meeting
16.	Internalisasi dan Pembinaan Integritas dan Rohani Pegawai Inspektorat Jenderal "Menjadi Pegawai ITJEN Berakhlik"	31 Maret 2023	Auditorium Inspektorat Jenderal dan Zoom Meeting



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
17.	Internalisasi dan Pembinaan Integritas dan Rohani Pegawai Inspektorat Jenderal “Menjadi Pegawai ITJEN Berakhlak”	14 April 2023	Auditorium Inspektorat Jenderal dan Zoom Meeting
18.	Internalisasi dan Pembinaan Integritas dan Rohani Pegawai Inspektorat Jenderal “Menjadi Pegawai ITJEN Berakhlak”	18 April 2023	Auditorium Inspektorat Jenderal dan Zoom Meeting
19.	Pengantar Purnabakti Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	27 April 2023	Auditorium Inspektorat Jenderal dan Zoom Meeting
20.	Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi (Biro Kepegawaian)	08 – 13 Mei 2023	Hotel Grand Mercure kemayoran
21.	Rekonsiliasi MSDM dengan Biro Kepegawaian	19 Mei 2023	Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal
22.	Pendampingan Virtual Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional	22 – 26 Mei 2023	Online Zoom Meeting
23.	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Bulan Juni 2023	05 s.d 07 Juni 2023 Hari I: Manajemen Konflik Hari II: Konsekuensi/Dampak JFA Terkena Hukuman Disiplin  Hari III: Pengelolaan Arsip Dinamis	<i>Offline</i> di Auditorium Itjen Lt. 16 dan <i>Online</i> melalui Zoom Meeting
24.	Rapat Kapabilitas APiP (ERM dan Telaahan Sejawat)	05 Juni 2023	<i>Offline</i> di Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal
25.	Rapat Materi Pelatihan MOOC	16 Juni 2023	BPSDM
26.	Forum Group Discussion Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Jenderal	6-9 Juni 2023	Hotel Aston Imperial Bekasi



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
27.	Rapat Benturan Kepentingan	22 Juni 2023	Ruang Rapat Inspektur Jenderal
28.	Rapat Rekonsiliasi e-ABK	26 Juni 2023	Ruang Rapat Inspektur Jenderal
29.	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Juli 2023	03 s.d 05 Juli 2023	Offline Di Auditorium Itjen Lt. 16 Dan Online Melalui Zoom Meeting
30.	Rapat Kapabilitas APIP (Telaahan Sejawat)	05 Juni 2023	Offline Di Ruang Auditorium Lt. 16 Inspektorat Jenderal
31.	Rapat TNA (Training Need Analysis) dengan LAN	17 Juli 2023	Ruang Rapat Kepegawaian
32.	FGD Akselerasi Pengembangan Karir Di Inspektorat Jenderal	25 s.d 28 Juli 2023	Hotel Harris Vertu Harmoni
33.	Evaluasi Kinerja Pegawai dan Implementasi Perban BKN No 23 Tahun 2023 di Lingkungan Inspektorat Jenderal	18 dan 20 Juli 2023	Auditorium dan Zoom Meeting
34.	Penilaian dan Pemilihan Pegawai Teladan Semester I Tahun 2023 di Lingkungan Inspektorat Jenderal	10-12 Juli 2023	Online
35.	Pemilihan Pegawai Teladan Semester I di Sekretariat Inspektorat Jenderal	04 Agustus 2023	Online Melalui Zoom Meeting
36.	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Agustus 2023	07 s.d 09 Agustus 2023	Offline Di Auditorium Itjen Lt. 16 Dan Online Melalui Zoom Meeting
37.	Registrasi Data Pegawai pada Mesin Kehadiran Terbaru Inspektorat Jenderal (verifikasi wajah)	09-10 Agustus 2023	Auditorium Itjen Lt.16
38.	Rapat Pembahasan Mutasi Pegawai dalam Jabatan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal	11 Agustus 2023	Ruang Sekretaris Inspektorat Jenderal Lt. 16
39.	Pembahasan Kertas Kerja Dan Penyusunan Draft Berita Acara Kegiatan Telaah Sejawat Intern Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan Ham	16 s.d 18 Agustus 2023	Ruang Rapat Inspektur Jenderal Dan Ruang RapatSekretaris



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
	Tahun 2023 Pada Inspektorat Wilayah I, III Dan V		Inspektur Jenderal
40.	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan LHKAN dalam rangka Percepatan Pencapaian Kepatuhan Pelaporan LHKASN dan SPT Pajak Tahunan di Lingkungan Kemenkumham	28 s.d. 29 Agustus 2023	Offline di Auditorium Itjen Lt. 16 dan Online Melalui Zoom Meeting
41.	Pendampingan Pengisian Panduan Perilaku APIP berdasarkan Core Values Ber-AKHLAK	29 Agustus 2023	Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal Lt. 16
42.	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan September 2023	4 s.d 6 September 2023	Offline Di Auditorium Itjen Lt. 16 Dan Online Melalui Zoom Meeting
43.	Rapat Penyusunan Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) di lingkungan Itjen Kumham	15 September 2023	Ruang Rapat Kepegawaian Lt.16
44.	Rapat Pembahasan Area of Improvement atau hasil evaluasi kapabilitas APIP Itjen Tahun 2022 dan Persiapan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di Lingkungan Itjen Tahun 2023	18 September 2023	Ruang Rapat Sekretaris Inspektur Jenderal
45.	Rapat Benturan Kepentingan	26 September 2023	Online Melalui Zoom Meeting
46.	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Bulan Oktober 2023	02 s.d 04 Oktober 2023	
47.	Pendampingan Diklat PRESTASI (Pelatihan Refleksidan Aktualisasi Integritas)	17 Oktober 2023	
48.	Sosialisasi Calon Peserta Program Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) di lingkungan Kemenkumham	16 Oktober 2023	Daring dan BPSDM Kemenkumham
49.	Rapat Kebutuhan Diklat	19 Oktober 2023	Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal
50.	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Bulan November 2023 bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Kemenkumham dengan tema "Mewujudkan Keluarga yang Berintegritas".	03 November 2023	Offline Di Auditorium Itjen Lt. 16 dan Online Melalui Zoom Meeting
51.	Pendampingan Diklat PELOPOR (Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi).	7 dan 9 November 2023	BPSDM Kemenkumham



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
52.	Evaluasi Aktif Belajar, Pelopor dan Prestasi.	13 November 2023	Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal
53.	Evaluasi PKP CoachKementan.	16 November 2023	Ruang Rapat Inspektur Jenderal
54.	Kegiatan Finalisasi Pengisian GAP Kompetensi Pegawai dan Kebutuhan Stakeholder di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN)	05 Desember 2023	Hotel Lumire
55.	Rapat Koordinasi Kenaikan Pangkat	13 Desember 2023	Ruang Rapat Inspektur Jenderal
56.	Rapat Mutasi dan Promosi Pegawai (Baperjakat)	14 Desember 2023	Ruang Rapat Inspektur Jenderal
57.	Rapat TL Pembagian Matriks Peran Hasil dalam rangka Penyusunan SKP Inspektorat Jenderal	15 Desember 2023	Auditroium Inspektorat Jenderal & Ruang Rapat Inspektur Jenderal
<b>Kelompok Substansi Humas dan SIP</b>			
1.	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	16 Januari 2023	
2.	Kegiatan Penguatan Unit PemberantasanPungli dan Unit Pengendalian Gratifikasi, Pembangunan Budaya Anti Korupsi serta Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo	22 Februari 2023	
3.	Kegiatan Pendampingan Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan <i>Sharing Knowledge Whistleblowing System</i> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 s.d 24 Februari 2023	
4.	Bimbingan Teknis Aplikasi Gratifikasi <i>Online</i> (GOL) Modul PPG - Pengisian Renja dan	03 Maret 2023	



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
	Realisasi Monitoring dan Evaluasi PPG Tahun 2023		
5.	Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	07 Maret 2023	
6.	Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	14 Maret 2023	
7.	Sosialisasi terkait UPG dan Gratifikasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	16 Maret 2023	
8.	Focus Group Discussion (FGD) perihal "Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Dalam Perspektif Psikologi Kriminologi"	21 Maret 2023	
9.	Rapat Pengisian Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) (B03 s.d B24) dan Penyampaian Data Dukung Pelaporan Triwulan I (B03).	03 April 2023	
10.	Sosialisasi Unit Layanan Pengaduan dan Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi Dan Terpadu (SIPIDU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	11 April 2023	
11.	Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	12 s.d 14 April 2023	
12.	Sosialisasi Pembangunan Anti Korupsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah	15 April 2023	
13.	Rapat Peningkatan penanganan layanan pengaduan dan rekonsiliasi data pengaduan Tahun 2021 s.d 2022	5 Mei 2023	
14.	Rapat Koordinasi Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di lingkungan Inspektorat Jenderal	8 Mei 2023	



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
15.	Koordinasi dengan lembaga Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP PT Tuv Nord Indonesia	12 Mei 2023	
16.	Penguatan pengendalian tugas dan fungsi pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	17 Mei 2023	
17.	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham dan Hak Asasi Manusia Papua	24 Mei 2023	
18.	Sosialisasi Penguatan UPP dan UPG di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham dan Hak Asasi Manusia Maluku	24 Mei 2023	
19.	Rapat Persiapan <i>Workshop</i> Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	08 Juni 2023	
20.	<i>Workshop</i> Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2023	12 Juni 2023	
21.	Sosialisasi Penguatan UPP dan UPG di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham dan Hak Asasi Manusia Jambi	15 Juni 2023	
22.	Sosialisasi Penguatan UPP dan UPG di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	19 Juni 2023	
23.	Sosialisasi Penguatan UPP dan UPG di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham dan Hak Asasi Manusia Maluku	21 Juni 2023	
24.	Rencana Kerja Tim Pokja UPP Kemenkumham	26 Juni 2023	
25.	Kegiatan Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi serta Sosialisasi Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung	26 Juni 2023	
26.	Rapat Persiapan <i>Workshop</i> Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di	08 Juni 2023	



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
	Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		
27.	Focus Group Discussion (FGD) Hasil Pengawasan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat	17 s.d 21 Juli 2023	
28.	Rapat Koordinasi UPP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	21 Juli 2023	
29.	Revitalisasi dan Penyematan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	25 Juli 2023	
30.	Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> / Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU), Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	26 s.d 29 Juli 2023	
31.	Focus Group Discussion/Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU), Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	30 Juli s.d 02 Agustus 2023	
32.	Focus Group Discussion (FGD) Hasil Pengawasan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat	17 s.d 21 Juli 2023	
33.	Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Mental Petugas Pelayanan Publik Badan Informasi Geospasial	07 Agustus 2023	
34.	Pendampingan / <i>Consulting</i> Pencegahan Praktik Pungutan Liar, Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi dan Monitoring/Evaluasi Pengelolaan pengaduan di Lingkungan Kantor Wilayah	22 s.d 25 Agustus 2023	





NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali		
35.	Focus Group Discussion (FGD) Hasil Pengawasan, Penguatan Budaya Antikorupsi dan Pelaporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	30 Agustus 2023 s.d 01 September 2023	
36.	Focus Group Discussion /Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU), Identifikasi Kendala Penerapan Manajemen Resiko (MR), Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	30 Agustus 2023 s.d 01 September 2023	
37.	Persiapan FGD Mitigasi Risiko Pungutan Liar	13 September 2023	
38.	Focus Group Discussion (FGD) Kemenkumham tema "Strategi Mitigasi Risiko Dalam Layanan Masyarakat"	10 Oktober 2023	
39.	Focus Group Discussion /Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu (SIPIDU), Monitoring Evaluasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	17 s.d 20 Oktober 2023	
40.	Focus Group Discussion (FGD) Hasil Pengawasan, Sosialisasi Anti Korupsi, Unit Pengendalian Gratifikasi, serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	24 s.d 27 Oktober 2023	
41.	Rapat Koordinasi Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM	10 November 2023	



NO	NAMA KEGIATAN	NO/TGL. SP	LOKASI KEGIATAN
42.	Rapat Kerja Nasional Satgas Saber Punglitema “Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Satgas Saber Pungli Tahun 2023”	27 November 2023	
43.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan melalui Aplikasi SIPIDU (Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	27 November s.d 01 Desember 2023	
44.	Evaluasi Pengelolaan Pengaduan dan Rekonsiliasi Data Pengaduan	7 Desember 2023	
45.	Evaluasi kegiatan UPP Kemenkumham Tahun 2023 dan Rencana Kerja UPP Kemenkumham Tahun 2024 serta Refleksi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023	11 Desember 2023	
46.	Pelaksanaan Penguatan Peran Focal Point dalam pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	12 dan 13 November 2023	
47.	Monitor dan Evaluasi WBS TPK Terintegrasi tahun 2023	22 Desember 2023	

#### 16) Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan

Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Wilayah dan realisasi Program Kerja Administrasi Umum selengkapnya dituangkan dalam Laporan berkala (Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan)

## BAB. IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Bahwa selama Tahun 2023 Inspektorat Jenderal mengemban :

1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM;
2. Tujuh Kegiatan yaitu Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya;
3. Sasaran dan terget Program serta Kegiatan ditetapkan dalam Indikator Kinerja dan dalam Perjanjian Kinerja;
4. Kinerja yang dicapai meliputi :
  - a) Tercapainya target IKU-IKK dan Perjanjian Kinerja;
  - b) Tercapainya target Program Unggulan;
  - c) Pengelolaan penyelenggaraan SPIP dilingkungan Inspektorat Jenderal, data dukungnya dituangkan dalam Laporan Triwulan dan Akhir Tahun;
  - d) Pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, data dukungnya dituangkan dalam e-rb online;
  - e) TARJA Inspektorat Jenderal terpenuhi targetnya per triwulan dan tidak ada nilai merah;
  - f) Pengelolaan pengisian monev kinerja SMART (penilaian oleh DJA-Kemenkeu), monev RKP (penilaian oleh Bappenas) dan e-performance (penilaian oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham);
  - g) Pelaksanaan Pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya) atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Kemenkumham;
  - h) Menyusun dokumen anggaran Tahun 2023 meliputi DIPA dan RKAKL, PKPT dan PKAU, *disbushement plan*, *procurement plan*, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Kebijakan pengawasan dan TARJA Inspektorat Jenderal Tahun 2023;
  - i) Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui Diklat, FGD, PKS, *Workshop*, BIMTEK, Sosialisasi dan studi banding;
  - j) Pengelolaan sarana prasarana penunjang kinerja, pengelolaan BMN dan pengelolaan persuratan serta arsip;
  - k) Pengelolaan gaji, tunjangan, keuangan kegiatan, pajak dan kartu kredit pemerintah;

- l) Pengelolaan data pelaporan gratifikasi, pengaduan masyarakat, pungutan liar, temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengawasan serta pengelolaan teknologi informasi;
- m) Pengelolaan kehumasan, publikasi berita, data Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta *website*, media social dan media koran online;
- n) Pengelolaan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan serta Perjanjian Kinerja;
- o) Resertifikasi ISO 37001:20016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- p) Pengelolaan LHKASN Pegawai Kemenkumham;
- q) Menyelenggarakan SPBE dengan melaksanakan upgrade SIMWAS menjadi E-MAWAS;
- r) Pengelolaan Layanan Konsultasi (tatap muka dan e-consul);
- s) Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas, sebagai data untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum dan HAM dan IKU Inspektorat Jenderal;
- t) Melaksanakan survei layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai dasar untuk mengukur Indikator Kinerja Output Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- u) Malaksanakan survei Internalisasi Tata Nilai serta bimbingan rohani sebagai dasar untuk mengukur salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal;
- v) Dalam Perencanaan Kinerja, Sekretariat Inspektorat Jenderal turut aktif dalam penyusunan penyesuaian RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi dari KemenpanRB. Rekomendasi terkait Misi, Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja di level Kementerian;
- w) Mengelola DIPA sebesar Rp69.026.935.000,- yang terealisasi sebesar Rp66.211.741.281,- (95,92%) per data OMSPAN tanggal 31 Desember 2023.

Keberhasilan kinerja tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Inspektorat Jenderal baik sumber daya manusia, sumber daya peraturan maupun sumber daya sarana prasarana, dengan meningkatkan koordinasi, kerjasama antar Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan Inspektorat Wilayah, antar satuan kerja di lingkungan Kemenkumham maupun antar Instansi terkait lainnya.

## B. KENDALA

1. Belum terintegrasinya data antara Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah;
2. Aplikasi SiSUMAKER belum dapat berjalan dengan optimal dikarenakan belum dapat diakses dengan cepat, terutama dalam verifikasi oleh pengendali teknis;
3. Jaringan Internal (Wi-Fi) tidak stabil sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan daring seperti *Workshop* ataupun aktif belajar;
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal;
5. Kegiatan *mandatory* mengalami pengunduran jadwal kegiatan sehingga mempengaruhi perencanaan penugasan lainnya (PKPT dan Non-PKPT);
6. Masih terdapat satuan kerja yang belum mengirimkan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait kerugian negara maupun administrasi;
7. Pelaksanaan penugasan yang padat dan berkelanjutan sehingga harus dilakukan kontrol atas laporan hasil penugasan dan pertanggungjawaban dapat diselesaikan secara tertib;

## C. SARAN

1. Perlu dibuat sistem terintegrasi antara Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan Inspektorat Wilayah.
2. Agar dilakukan monitoring terkait aplikasi SiSUMAKER pada Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan.
3. Agar bagian umum dapat memonitor terkait Wi-Fi secara berkelanjutan.
4. Perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal agar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat berjalan optimal.
5. Perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal agar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat berjalan optimal.
6. Melaksanakan koordinasi kepada Satuan Kerja terkait proses tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan secara berkala.
7. Melakukan kontrol atas pelaporan kegiatan pengawasan dan keuangan agar dapat segera diselesaikan.



Jakarta, 12 Januari 2024  
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yayah Mariani  
NIP. 196403111994032007